

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Pada Pengadilan Agama Sleman)**



**TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

**Oleh :
RAHADYAN SETIAWAN, SH.
B4B.001179**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM
(Study Pada Pengadilan Agama Sleman)**

Oleh :

RAHADYAN SETIAWAN, SH.
B4B.001179

Telahi di pertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 Desember 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima

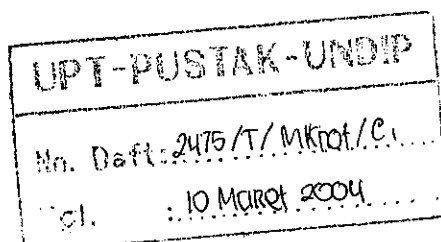
Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi
Megister Kenotariatan

Prof.H.ABDULLAH KELIB, SH.
NIP. 130/354.857

Prof.I.G.N.SUGANGGA, SH.
NIP.130.359.063



PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya di jelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang

RAHADYAN SETIAWAN, SH.
NIM: B4B.00.1179

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Islam (study pada Pengadilan Agama Sleman), RAHADYAN SETIAWAN, SH.106 halaman, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan. Program Magister Universitas Diponegoro.

Pembagian waris dalam sistem Hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, tetapi seiring dengan perjalanan waktu pembagian warisan dengan menggunakan Hukum Islam di Peradilan Agama di cabut oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagai gantinya kewenangan menangani perkara warisan di alihkan ke Pengadilan Negeri yang dengan dasar pemeriksaan berdasarkan hukum Adat atau Hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum adat (teori receptie). Setelah Indonesia merdeka keinginan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara waris makin nampak dan puncaknya adalah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan diberlakukan praturan-praturan tersebut maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan penuh dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Salah satu aspek utama dalam pembahasan tesis ini yaitu masalah pelaksanaan warisan yang dilakukan berdasarkan produk-produk Pengadilan Agama. Dalam proses pelaksanaan produk Pengadilan Agama tersebut untuk perkara warisan akan timbul masalah-masalah dan hambatan-hambatan. Oleh karena itu tesis ini diberi judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Study pada Pengadilan Agama Sleman).**

Hambatan dalam pembagian waris sama saja hambatan dalam menegakan hukum, sebab pelaksanaan pembagian waris dimulai setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim tersebut adalah hukum bagi pihak-pihak yang berperkara secara khusus dan menjadi hukum secara umum bagi masyarakat. Putusan hakim harus dihormati dan dijalankan, sebab putusan hakim tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan serta berdasarkan dan penafsiran terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist, ataupun Ijtihat yang bertanggung jawabnya langsung kepada Allah SWT.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang ditunjang dengan sosiologi yaitu didasarkan pada peraturan-peraturan serta hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan serta berdasarkan dengan kenyataan di dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa:

(1)Tatacara pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama bermula dari suatu Penetapan dan Putusan Perkara yang sebelumnya telah melalui hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama.

(2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan warisan datang dari pihak ter hukum yang tidak segera melaksanakan putusan hakim serta hambatan-hambatan dalam pengeksekusiannya serta jenis dan sifat objek yang disengketakan yang akan dibagikan.

(3) Timbulnya permasalahan dalam penerapan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berkaitan dalam masalah warisan adalah adanya hak opsi dan sengketa hak milik yang dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.

ABSTRACT

The implementation of the distribution of heritage based on the Islamic law (Study at Sleman Religion Court), Rahadyan Setiawan, SH. 106 pages, thesis, Semarang, Notary Magistre Study Program. The Program of Magistre Diponegoro University.

The distribution of heritage in the Islamic law system through the Religion Court institution has already existed since Hindia Belanda government, but as time passes, the distribution of heritage by using the Islamic law in the religion court had been withdrawn by the Hindia Belanda government and as the substitute by the authority to handle the heir case is given to the public court according to the checking based on the Adat law or the Islamic law which has become part of the customary law (theory receptie). After Indonesian Independence, the wish to activate the authority of Islamic Court to ward the heir case appeared clearly, and the peak of this matter is the effectiveness of the constitution number. 7/1989 about the Religion Court and the Islamic Law Compilation.

By making the rules to be in effect, the Religion Court has the full authority to check and decide the certain civil case to the Islamic people. One major aspect in this thesis about the heir matters that are done based on the Religion Court Products.

In using those Religion Court Products for the matters, there will be several problems and obstacles appear. Based on those reasons, this title of this thesis is: The Implementation of the Distribution of heir based on the Islamic Law (Study at Sleman Religion Court)

The obstacle in the distribution of heir is similar with the obstacle in up holding the law, because the implementation of the heir distribution will be started after the judge decision, which has the Strict Law Strength.

The judge decision will become laws for the certain litigate persons and become the general laws for people. The judge decision should be done and respected, because the judge decisions have been reached through several value judgments and based on the Al-Qur'an, Hadist, and Ijtihat which should be responsible directly to Allah SWT.

The approaching method being used is the normative juridical which is supported by the sociology based on the regulations and law which is closely related with the problems and based on the reality in the community.

From the result of the survey and discussions, it is found out that:

1. The legal structure implementation in the distribution of heir in the Religion Court started from determining and reaching the decision of a case through the judicial procedure in the judicature religion.
2. The obstacles which appear in the implementation of heir coming from the sentenced person that is not doing the judge decision and some obstacles during the execution and the kind and characteristic of the object being law suited will be distributed.
3. The emerge in the implementation of the constitution number.7/1989 related to the inheritance is the optional right and the lawsuit of properties which can cause the lawsuit of authority to bring to justice among judicature area.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM" (Studi pada Pengadilan Agama Islam). Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (S2) pada fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini dapat penyusun selesaikan atas bantuan semua pihak. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penyusun mengucapkan banyak terima kasih terutama pada :

1. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH., sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian serta perhatiannya kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penyusunan tesis ini .

4. Bapak Noor Rahardjo, SH., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dukungan akademis kepada penyusun .
5. Yang Terhormat seluruh Dosen Pengampu pada Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dalam hal teknis administrasi dalam penyelesaian tesis ini
7. Bapak Drs. Mukti Artho, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan riset dan penelitian data-data ditempat tugasnya.
8. Bapak Drs. Saifuddin, selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman yang telah banyak meluangkan waktunya disela-sela tugasnya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini
9. Kepada kedua orang tua penyusun Bapak H. Boeaiti Achmad Bakri dan Ibu Hj. Nurfatmah yang telah banyak memberikan dorongan moral dan doa serta rasa kasih sayangnya yang tulus dan tak terkira kepada penyusun.

10. Kepada Keluarga besar Bapak Soenarto yang telah banyak memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada penyusun hingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan Notariat.
11. Kepada anak-anakku tersayang Cinda Khansa Arroiffah dan Fareesdzy Akhtarrabillah Setiawan, serta Istriku tercinta Nur Ambarwati, SH. Yang tetap setia memberikan dorongan moril dan cinta kasih kepada penyusun untuk menggapai cita-cita yang diinginkan.
12. Kepada sahabat-sahabatku Joko, Agung, Munir, Pak Wira, Pak Is, Saiful, Mbak Wing, Mbak Ning, Rika, Ricko, Wiwid, Titin, Teti, Mbak Ari, Lia, Yana, Diana, Dian, Ida, Jeffri, Lina, Ngadiman, Purnawan, Shanti, Viktor, Wahyu, Fauzan, Pak Yanto, Eka, Agus, Mbak Made, Bu Ambar, Pak Kujianto Polisi dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas segala kerja sama selama ini dalam studi Kenotariatan serta persahabatan yang telah terjalin dan semoga akan tetap terjalin selamanya.

Tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini, semoga amal baik semuanya itu mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna sebab kesempurnaan hanya ada pada Allah SWT semata, tentunya banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan, karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik membangun demi kebaikan tesis ini.

Dan akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi pengembangan pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam di Indonesia.

Penyusun

RAHADYAN SETIAWAN, SH
B4B. OO.1179

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Kewarisan Islam	10
B. Pengertian Hukum Waris Islam.....	11
C. Sumber Hukum Islam	13
D. Perubahan Sistem Kewarisan dalam Al-Qur'an	18
E. Asas-asas Hukum Waris Islam	19
F. Rukun Waris Islam.....	24
G. Sebab-sebab Mewaris	28
H. Penghalang Warisan	31
I. Golongan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya	36
J. Tinjauan Umum Peradilan Agama.....	43
K. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam	60
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 63
A. Metode Pendekatan.....	64
B. Spesifikasi Penelitian.....	65
C. Lokasi Penelitian	66
D. Sampel dan Teknik.....	66
E. Sumber Data	67
F. Instrumen Penelitian	68
G. Teknik Analisa Data	69
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 71
A. Tatacara Pembagian Warisan di Pengadilan Agama.....	71
B. Hambatan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	87
C. Masalah Yang Timbul dalam Penerapan UU No. 7 Tahun 1989 Berkaitan Dalam Masalah Warisan.....	93

BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	104

RINGKASAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, bahkan termasuk jumlah paling banyak umat pemeluk agama Islam dalam suatu negara. Ada sekitar 90% umat Islam di Indonesia dari lebih 200 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, sayangnya dengan jumlah umat Islam sebesar tersebut tidak diimbangi dengan kuantitas hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif.

Setelah diberlakukan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 dan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, sedikit banyak telah menambah khasanah hukum positif di Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam pada khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Implementasinya jelas sangat memberikan faedah yang sangat bermanfaat, yaitu bagi rakyat pencari keadilan serta sebagai tonggak berlakunya sistem hukum Islam di negara Pancasila.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh hakim Peradilan Agama dapat dipakai untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu yaitu dengan menggunakan dalili-dalil yang berdasarkan Al Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Artinya umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam. Jika dikaji dari segi hukum Positif dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam maka umat Islam di Indonesia diberikan pilihan (*opsi*), untuk pilihan tersebut terserah keinginan umat itu sendiri apakah ia mau mempergunakan Hukum Islam ataukah Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu (perkawinan, warisan, wakaf).

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Untuk masalah warisan terdapat dalam pasal 49 ayat (3) tersebut ditentukan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu :

1. Penentuan siapa-siapa yang jadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dikalangan masyarakat Islam di Indonesia, sejak dahulu telah diterapkan hukum adat secara terus menerus sebagai hukum yang hidup, terutama di daerah-daerah terpencil di pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai keluhuran adat nenek moyang. Tetapi kenyataannya dari segi Aqidah umat Islam dituntut untuk menjalankan kewajiban untuk menggunakan hukum Islam dalam penerapan pembagian warisan.

Keberadaan Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan umumnya lebih satu abad serta hukum materialnya sangat bervariasi dan masih berserakan dalam berbagai kitab Fiqih. Maka konsekwensinya adalah sebuah putusan pada sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 adalah putusan hakim yang tidak mempunyai kepastian hukum, kenyataannya adalah suatu putusan hakim dalam suatu kasus yang sama dengan hakim yang berbeda maka putusannya akan variatif dan sangat beragam. Namun setelah berlaku Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang nomor 7 tahun 1989) dan Kompilasi Hukum Islam maka pemeriksaanya dihadapan hakim Peradilan Agama telah mempunyai dasar kesatuan hukum nasional, kecil kemungkinan putusan pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam terulang kembali. Kompilasi Hukum Islam untuk sementara sebagai pedoman Hukum waris Islam di Indonesia yang terdapat dalam Buku II dapat dijadikan

pegangan bagi orang-orang pencari keadilan memberikan tujuan antara lain yaitu:

1. Merumuskan Hukum Islam di Indonesia secara sistematis.
2. Landasan penerapan hukum Islam di Peradilan Agama.
3. Sifatnya Kompilasi Berwawasan Nasional (bersifat supra subkultural, aliran, Mahzab) yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia, apabila timbul sengketa di Peradilan Agama.
4. Adanya penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang pasti dan lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.¹

Dalam pengertian analoginya Hukum waris Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum waris Perdata barat yaitu hukum yang mengatur pengalihan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris kepada siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya dan menentukan berapa besar masing-masing bagian ahli waris mendapat harta warisan.

Mengenai pembagian warisan pada dasarnya tergantung dari hukum itu sendiri yang mengaturnya seperti halnya dalam hukum adat Jawa ada istilah "sepikul segendongan" artinya anak laki-laki dapat sepikul anak perempuan dapat segendong" yaitu perbandinganya 2 : 1, tetapi jika ada kasus yang masuk memungkinkan hukum adat tersebut di kesampingkan.

¹ Prof.Abdullah Kelib, SH. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Beberapa catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam)*. UII Pres Yogyakarta 1993

Sehubungan dengan masalah tersebut Wirjono Prodjodikiro pada saat pembuatan rancangannya mengusulkan agar di dalam Undang-Undang Peradilan Agama dapat ditentukan:

1. Bahwa pembagian harta warisan anak laki-laki dan bagian anak perempuan adalah sama.
2. Bahwa apabila si meninggal warisan meninggalkan anak-anak baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, maka semua harta warisan jatuh pada anak-anak itu disamping janda si meninggal tersebut²

Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam penentuan siapa-siapa ahli warisnya, penentuan harta peninggalannya, penentuan bagian masing-masing dan pelaksanaannya lebih jelas. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Pada pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Dengan demikian apabila terjadi sengketa mengenai harta peninggalan

² Wirjono Prodjodikiro, *Bunga Rampai Hukum Karangan Terbesar*. Ichtiar Baru Jakarta, cet I 1974

dalam pembagian warisan tersebut dapat diperiksa dan diputuskan melalui jalur hukumnya, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perselisihan. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Agama bahwa apabila terjadi perselisihan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan memilih hukum yang mana yang akan digunakan dalam pembagian waris.

Secara keseluruhan hukum waris itu selalu berlandaskan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, karena Pancasila didalam hukum waris adat merupakan penjabaran kedalam suatu bidang kebendaan. Jadi Pancasila merupakan sarana atau alat untuk menangkai silang sengketa atas harta kekayaan atau harta pusaka yang ditinggalkan, dan dapat dikatakan dengan berdasarkan pada Pancasila, penerusan atau pembagian harta peninggalan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tatacara pembagian warisan di Peradilan Agama?
2. Hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan oleh Pengadilan Agama?

3. Apa masalah yang timbul dalam penerapan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama berkaitan dengan masalah kewarisan.?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah dilakukan oleh peneliti harus mempunyai tujuan pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti dalam mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukkan suatu kualitas dari hasil penelitian itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pembagian Warisan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui masalah yang timbul dalam penerapan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama berkaitan dengan masalah kewarisan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu hasil penelitian akan memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri, Akademisi, Pratisi, Pemerhati hukum Islam, alim ulama dan masyarakat luas

1. Bagi peneliti manfaat yang akan di ambil dari penelitian ini yaitu akan memberikan ilmu pengetahuan yang jelas tentang pembagian waris dalam prespektif hukum Islam serta menambah wawasan pengetahuan Ilmu Hukum
2. Bagi kalangan Akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber Informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang Pelaksanaan pembagian waris Islam dalam mengahdapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari
3. Bagi kalangan Praktisi dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berharga dalam melaksanakan tugas-tugas yang di embangkanya serta diharapkan juga dengan hasil penelitian ini dapat menemukan solusi pemecahan yang terbaik jika suatu waktu terdapat kesulitan-kesulitan yang tujuannya tidak lain akan memberikan rasa kepuasan dari masyarakat atas kinerja para praktisi dalam mengambil suatu keputusan yang mempunyai kepastian hukum.

4. Bagi para pemerhati Hukum Islam, alim ulama hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuannya dibidang fiqih Islam serta memberikan informasi penting kepada masyarakat sehingga akan memberikan kemaslahatan umat.
5. Bagi masyarakat luas diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan kesadaran bahwa Islam juga mempunyai hukum warisan Materiil dan Formiil yang bukan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan social seperti yang dikatakan C. Snouk Hurgronje³ disamping hukum adat dan hukum perdata barat serta dapat diterapkan dan digunakan apabila disuatu hari terbentur permasalahan perwarisan.

³ **Abdul Ghofur Anshori, SH.MH.** *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas).* EKONOSIA FE-UII. Yogyakarta 2002 Cet I

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewarisan Islam

Pengertian waris dalam Buku Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab yaitu *warisa-yarisu-warisantau irsan/turas* yang berarti mempusakai adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak system kekerabatan, bahkan juga merombak system pemilikan harta didalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan⁴

⁴ Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5. Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta 1993 Cet I

B. Pengertian Hukum Waris Islam

Dari gambaran pengertian waris diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris Islam adalah sekumpulan peraturan yang mengatur peralihan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak.

Untuk pengertian hukum waris Islam dapat kita cari landasan pemikirannya yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵

Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang tidak sah (batil)

Dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara harta yang halal yang boleh diambil adalah harta pusaka (harta warisan). Dalam Al Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah⁵

⁵ H.Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru. Bandung 1992 Cet 25

Menurut pendapat H. Achmad Azhar Basyir, MA. bahwa hukum Faraid ada dan dipelajari karena memang untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam itu sendiri dan hukum Islam itu tercipta memang untuk mengatur hidup manusia. Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam karena itu ayat Al-qur'an mengatur hukum waris itu sangat terperinci, hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami setiap manusia ⁶.

Dengan diacukanya hukum kewarisan Islam kepada legalisasi pokok, yaitu Al-Qur'an memberikan makna bahwa hukum kewarisan Islam bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat tetapi berseumber dari Dzat yang ada diluar masyarakat (Allah), sedangkan manusia hanya pelaksana saja.

Pengertian hukum waris Islam didalam perundang-undangan memang belum ada, pengaturan hanya ada di Kompilasi Hukum Islam, namun walau demikian peraturan tersebut sangat besar makna bagi para pencari keadilan serta aparat penegak hukum Islam, berikut pengertian hukum Waris Islam dapat ditemui dalam Buku II Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

"hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

⁶ H.Ahmad Azhar Basyir,MA. *Hukum Waris Islam*.UII Pres Yogyakarta 1985

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagian masing-masing”

Materi hukum yang terdapat dalam hukum kewarisan yang digunakan sebagai pegangan untuk memutuskan suatu perkara tersebut berasal dari Al Qur'an, Hadist dan Kitab-kitab Fiqih.

Dalam Buku II tersebut terdiri dari VI Bab yaitu ;

1. Bab I tentang Ketentuan Umum.
2. Bab II tentang Ahli waris.
3. Bab III tentang Besarnya Bagian.
4. Bab IV tentang Aul dan Rad.
5. Bab V tentang Wasiat.
6. Bab VI tentang Hibah.

C. Sumber Hukum Waris Islam.

Hukum Waris Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang Muamalah tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek lain dari ajaran agama Islam, karena itu penyusunan kaedah-kaedahnyalah haruslah berdasarkan pada sumber hukum yang sama.

Sumber-sumber hukum tersebut adalah;

1. Al-Qur-an.
2. Sunnah/Hadist Nabi.

3. Ijtihad.

Penggunaan ketiga sumber ini didasarkan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

Pada Al-Qur'an terdapat di Surat An-Nissa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RosulNya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rosul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*

Ayat ini memberikan perintah kepada kaum Mukmin untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri. Maksudnya agar orang Mukmin dalam memecahkan masalah hendaknya senantiasa mengikuti dan berdasarkan ketiga sumber Hukum tersebut.

Pada Haddist yaitu dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang terjemahannya yaitu:

Nabi bertanya: Apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan perkara yang harus diputus? Jawab Mu'adz : Saya akan memutuskan berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an) Nabi bertanya lagi : Jika dalam Al-Qur'an tidak kamu jumpai? Jawab Mu'adz : Saya akan memutuskan atas dasar Sunnatullah. Nabi bertanya lagi : Jika tidak kamu jumpai dalam Sunnatullah? Jawab Mu'adz : Saya akan menggunakan akalku dan tidak akan membiarkan perkara itu tanpa putusan....

Dari tulisan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumber Hukum Islam ada tiga, berikutnya akan penulis rincikan satu per satu yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga tetapi pada hakikatnya kedua sumber setelahnya yaitu Sunnah dan Ijtihad haruslah terlebih dahulu mendahulukan Al- Qur'an sebagai sumber Pokok. Khusus dalam masalah pewarisan Al'-Qur'an telah memberikan pedoman yang sangat terperinci.

Ayat-ayat yang mengatur kewarisan hampir semuanya terdapat dalam Surah An-Nissa dan sebagian di surah lainnya. Dari ayat-ayat yang menyangkut masalah kewarisan tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu :

1. Ayat Kewarisan Inti
2. Ayat Kewarisan Pembantu⁷

Kelompok ayat kewarisan inti yaitu ayat-ayat yang langsung menjelaskan masalah kewarisan yaitu surat:

- a. Surat An-Nissa ayat 7

Tentang persamaan hak mendapatkan warisan baik itu laki-laki maupun perempuan.

- b. Surat An-Nissa ayat 11 dan 12

Tentang detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan utang pewaris dan wasiat terlebih dahulu

- c. Surat An-Nissa ayat 33

Tentang ahli waris pengganti

- d. Surat An-Nissa ayat 176

Tentang kemungkinan lain yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak dan mawali atau yang disebut dengan KALALAH.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, SH. MH. *Op cit*

2. Sunnah Rasul

Sunnah Rasul adalah suatu perilaku tauladan dari Rasulullah dalam suatu perbuatan dan pendapat yang dianggap suatu kaedah dalam suatu kepentingan hukum Islam. Sunnah Rasul dianggap suatu sumber legalisasi kedua setelah Al Qur'an memiliki fungsi

- a. Sebagai penafsir dalam memberi petunjuk konkrit terhadap Al Qur'an
- b. Sebagai sumber dalam membentuk hukum sendiri seperti misalnya dalam hal Wala'
- c. Sebagai penguat terhadap Hukum kewarisan di dalam Al Qur'an seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Lima Muhaddisin selain Muslim dan dari Ibnu Mas'us tentang bagian anak perempuan sebanyak separuh dalam kasus "seseorang hanya seorang diri tanpa ada saudara laki-laki".

Hadist ini sebagai penguat Al Qur'an surat An-Nissa 11

Adapun Sunnah Rasul yang merupakan pesan bagi umatnya agar untuk mempelajari masalah kewarisan, seperti sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hamba

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmunya akan hilang hampir-hampir dua orang bersengketa"

dalam faraidl dan masalahnya, maka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya."

3.Ijtihad

Al-Qur'an dan Hadist adalah sumber hukum dan pedoman yang dipandang sangat lengkap dalam masalah kewarisan, namun dengan perubahab zaman yang terus berkembang dari waktu ke waktu, karena itu sangat dibutuhkan penanganan-penanganan dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Umat Islam dituntut untuk membereskan segala persoalan dan tidak diperkenankan melalaikan suatu persoalan tanpa ada putusan yang adil dengan dalih tidak ada dasar hukumnya yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist.

Oleh karena itu para Mujtahij dituntut untuk segera membuat peraturan-peraturan (Ijtihad) untuk membendung segala permasalahan yang telah timbul dan akan timbul dikemudian hari.

D. Perubahan sistem Kewarisan dalam Al-Qur'an.

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam Islam. Apalagi Islam pada

awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam perubahan sistem kewarisan dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Islam memdudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan diluar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan.
- b. Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimum dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris
- c. Suami isteri saling mewarisi, suatu hal yang paling bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri sebagai salah satu harta warisan.
- d. Adanya perincian bagian tertentu dalam keadaan tertentu, yang berfungsi untuk menutup kemungkinan sengketa diantara ahli waris.

E. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas Hukum waris Islam pada dasarnya adalah sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi dilakukannya suatu pembagian waris. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat

hukum kewarisan didalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi serta Ijtihad para Mujtahid.

Asas-asas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas Ijbari.

Secara Etimologis kata "Ijbari" mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut. Dengan perkataan lain, dengan terjadinya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka atau tidak suka.

Asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa segi:

- (a) Dari segi peralihan harta.
- (b) Dari segi jumlah harta.
- (c) Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas Ijbari ini dapat diketemukan antara lain didalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ⑧

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan ayat ini berkaitan erat dengan asas Ijbari bahwasanya yaitu apabila seorang meninggal dunia harta benda miliknya yang ia tinggalkan hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan baik yang meninggal bapak maupun ibu⁸

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas Bilateral dalam konteks hukum waris Islam adalah bahwa seorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kekerabatan yaitu pihak baik bapak maupun ibu. Asas Bilateral dapat kita lihat dalam Al-Qura'an surat An-Nissa ayat 7, 11,

⁸ Prof.DR. Hamkah, *Tafsir Al-Azhar (juzu'4)* Pustaka Panji. Jakarta 1983

12, dan 176. Yang paling tegas menyatakan adalah Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 7 menyatakan dengan tegas bahwa seorang laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya baik dari Ibu maupun bapaknya serta kerabatnya.

Dari bunyi ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah anti kepada masyarakat yang unilateral yaitu masyarakat yang berklan-klan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal maupun patrilineal⁹

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian-bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris (secara Individual) telah ditentukan. Haram baginya

⁹ Prof. DR. Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*. Tintamas. Jakarta 1967. Cet IV

orang yang mengambil harta warisan yang bukan haknya sebab pembagian harta warisan itu adalah kehendak Allah dan tidak diperkenan orang mengubahnya¹⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hal hak kewarisan, (kebalikan dari asas keseimbangan ini dapat dijumpai dalam masyarakat sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal dalam masyarakat hukum adat)

5. Asas Kewarisan Semata terjadi Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam berpegang teguh bahwa peralihan hak pewarisan semata-mata dikarenakan adanya peristiwa kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih sewaktu pewaris masih hidup dikarenakan pewarisan, jikalau hal ini terjadi hal ini tidaklah dikatakan pewarisan tetapi lebih tepat dikatakan Hibah dan hibah ini biasanya

¹⁰ Prof.DR. Hamkah. *Op.Cit.*

terjadi semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup.

F. Rukun Waris Islam

Dalam hukum waris berlaku ketentuan mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan rukun tersebut meliputi:

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia

Harta warisan dapat dibagi setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia baik secara fisik maupun secara hukum, tidak mungkin dibagi harta warisan sebelum adanya peristiwa kematian baik itu diketahui secara pasti atau putusan hakim orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya apakah ia sekarang ini sudah mati apakah masih hidup. Jadi apabila hakim telah menetapkan bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia berdasarkan petunjuk yang ada barulah harta warisan (tirkah) dapat dibagi. Jadi syarat dari pembagian waris itu adalah pewaris secara pasti telah meninggal dunia atau atas putusan hakim.

2. Adanya Mewaris

Mewaris adalah ahli waris yaitu orang yang menurut hukum berhak mendapat harta warisan karena Nasab, hubungan perkawinan, Walak, dan Jihatul Islam. Hukum waris juga menetapkan adanya mewaris yang memenuhi syarat atas harta warisan. Mereka adalah ayah, ibu suami, isteri, anak laki-laki ataupun perempuan.

3. Adanya harta peninggalan atau pusaka (*tirkah*)

Harta peninggalan atau harta pusaka dalam bahasa Arab disebut "*Tirkah atau Tarikah*" yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik yang berbentuk benda maupun yang berbentuk hak-hak kebendaan dan yang bersifat bukan hak-hak kebendaan.¹¹

Melihat defenisi harta peninggalan diatas maka dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan terdiri dari:

a. Berbentuk Benda.

Maksudnya adalah masuk kategori benda bergerak, bendak tidak bergerak dan piutang-piutang.

b. Hak-hak Kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan yaitu sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan.

¹¹ Muhamad Ali As-Shabuni. *Hukum Waris Islam dalam Syariat*. CV.Diponegoro 1988

c. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *ikhyiar*, *hak syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah satu anggota sarikat atau hak tetangga atas tanah perkarangan dan lain-lain).

Sebelum harta peninggalan atau pusaka dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari

i. Zakat atas harta peninggalan

Zakat harta peninggalan adalah zakat yang semestinya harus dibayar oleh si mayat pada saat si mayat belum meninggal, tetapi pembayaran zakat itu belum dapat direalisasikan karena keburu meninggal dunia, maka zakat ini tersebut harus dibayar terlebih dahulu yang diambil dari harta peninggalan atau pusaka.

ii. Biaya pemeliharaan mayat

Artinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan jenazah misalnya seperti kain kafan dan upacara penguburan.

iii. Hutang-hutang

Pada saat hidupnya dahulu mungkin si pewaris pernah mengadakan perjanjian hutang dan pada saat matinya hutang tersebut belum seluruhnya lunas atau masih dalam tagihan kreditur, maka dari tirkah tersebutlah yang harus melunasi.

iv. Wasiat

Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris dan jumlah wasiat itu tidak boleh lebih dari **sepertiga** dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Pernyataan diatas sejalan dengan Hadist yang diriwayatkan Muslim yang artinya sebagai berikut :

"(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain"

Dari uraian diatas barulah harta tersebut berbentuk harta warisan murni dan harta warisan inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris, dan untuk lebih memperjelas pengertian harta peninggalan dan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dalam Buku II

tentang kewarisan pada Bab I tentang ketentuan Umum pasal 171 point d dan point e yaitu sebagai berikut.

-point d

Harta peninggalan adalah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

-point e

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, dari biaya pengurus jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian kerabat atau yang disebut wasiat.

Pengertian lebih lanjut tentang harta bawaan dan harta bersama pada point e dapat dijelaskan pada Buku I tentang Perkawinan Bab XIII pasal 87 ayat (1) dan pasal 91.

G. Sebab-sebab Mewaris.

Hukum waris Islam telah mengatur sebab-sebab seorang mendapat warisan atau menjadi ahli waris. Adapun sebab-sebab seseorang mendapat harta warisan itu adalah sebagai berikut;

1. Karena Hubungan Nasab

Hubungan Nasab atau hubungan kekerabatan adalah adanya hubungan darah dengan si pewaris baik itu hubungan darah secara horizontal seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu dan seterusnya ataupun vertical (*hawasyi*) seperti saudara, paman, bibi, dan seterusnya.¹²

2. Karena Hubungan Perkawinan

Seorang mendapat harta warisan atau menjadi ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si pewaris dengan orang tersebut (suami atau isteri)

¹² **Anak Zinah** yaitu anak yang lahir karena hubungan laki-laki dan perempuan diluar media akad nikah (**zinah biasa**) atau zinah yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (**zinah Muhson**) yang dilakukan secara sengaja maka anak tersebut hanya mewarisi dari kekerabatan ibunya saja tidak dengan ayahnya.

Anak Subhat adalah anak hasil hubungan akibat kelalain dari pelaku yang sudah terikat perkawinan yang mengira istri atau suaminya yang digauli padahal bukan (Subhat Perbuatan), sedangkan apabila orang yang melakukan perbuatan hubungan kelamin melalui akad nikah tetapi ternyata pasangannya itu termasuk bukan orang yang tidak sah dinikahi. Pengaruh dalam penerimaan warisannya adalah hanya mendapat warisan dari laki-laki yang membuahi perempuan itu.

Anak Angkat dalam Islam secara tegas tidak menerima warisan, ia hanya menerima warisan dari orang tuanya yang sah atau kerabatnya (QS AL-Ahzaab ayat 4 & 5), tetapi oleh UU nomor 7 tahun 1989 anak angkat mewarisi melalui wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Peraturan ini sebagai perombakan dari tradisi Hukum Arab Jahiliyah dan dapat dibandingkan dengan hukum adat Jawa(khususnya Purworejo) dimana anak angkat mendapat warisan harta Gono-gini.

Anak tiri hanya mewarisi dari orang yang telah melahirkannya saja yaitu ibunya saja.

3. Karena Walak

Hubungan walak adalah hubungan antara budak dengan orang yang memerdekannya, apabila budak yang telah dimerdekannya meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris serta kerabat seorang pun yang dapat menghabiskan seluruh harta warisannya, maka otomatis seluruh harta warisan tersebut mengalir keorang yang memerdekakannya.

Dalam hukum Islam kedudukan orang yang memerdekakan budak sangat istimewa antara lain:

- a. Mendapat harta warisan seluruhnya apabila bekas budak tersebut tidak meninggalkan kerabat
- b. Jika ia akan menikahi budak tersebut, apabila ia laki-laki ia tidak perlu membayar mahar, karena pembebasan tersebut sudah dianggap mahar.
- c. Jika bekas budak tersebut akan menikah maka ia dapat menjadi wali nasab bagi budak yang akan melangsungkan pernikahan itu.

4. Jihatul Islam (*Baitul Mal*)

Jika pewaris meninggal dunia namun tidak meninggalkan kerabat seseorangpun maka tirkahnya jatuh ke Baitul Mal (perbendaharaan Negara dalam konteks negara Islam).

H. Penghalang Warisan.

Dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa penghalang untuk mendapat warisan terdiri dari :

1. Membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Menfitnah pewaris telah melakukan kejahatan berat yang ancamannya minimal hukuman 5 tahun penjara.

Dalam hukum Islam yang berlaku umum penghalang warisan dapat di bedakan menjadi :

1. Mamnu atau Mahrum

Yaitu orang yang berhak tetapi kepadanya terdapat penghalang sehingga ia tidak mendapat harta peninggalan. Penghalangnya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum Islam.

Ada tiga penghalang pusaka yang disepakati para ulama yaitu:

a) Pembunuh.

Yaitu orang yang membunuh pewaris, maka ia tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya.

Dijelaskan hadis riwayat An Nas'i.

Tidak berhak sipembunuh pembunuh mendapat sesuatupun dari harta warisan.

b) Perbedaan Agama.

Ialah adanya perbedaan agama antara pewaris maupun ahli waris. Dalam hal ini sama saja apakah pewaris bukan agama Islam maupun ahli waris bukan beragama Islam. Oleh sebab itu tidak ada pusaka buat ahli waris.

Hadist Riwayat Jama'ah menyatakan:

Orang Islam tidak mewarisi orang kafir begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam.

c) Murtad

Murtad adalah orang yang meninggalkan agamanya dan beralih ke Kafir dengan kemauan sendiri. Ahli waris demikian tidak akan pernah mewarisi

Hadist Nabi bersabda dari Abi Darbah:

Beliau berkata kepada, saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan isteri bapaknya, maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya dan membagi-bagi hartanya sebagai harta rampasan. Sedangkan ia adalah murtad

2. Mahjub

Mahjub adalah orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, akan tetapi oleh karena ada ahli waris lain yang menghalanginya yang lebih dekat dengan pewaris.

Hijab adalah penghalang bagi orang menerima warisan yang terdiri dari;

a). Hijab Nuqshon.

ialah penghalang yang mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris lain yang bersama-sama dengan dia sehingga bagian dia berkurang

Contoh : Isteri dapat $\frac{1}{4}$ karena tidak ada anak atau cucu, namun, dapat $\frac{1}{8}$ karena ada anak atau cucu

b). Hijab Hirman

ialah penghalang yang mencegah ahli waris untuk memperoleh warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya atau hubungan kekeluargaannya dengan si pewaris.

Contoh: cucu mendapat bagian tetapi hilanglah bagiannya karena masih ada anak yang masih hidup, demikianlah kakek terhalang oleh bapak, nenek terhalang oleh ibu, cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, saudara kandung

terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak
demikianlah seterusnya.

DAFTAR HIJAB

No	HIJAB	PENGHIJAB
1	K a k e k	Ayah
2	N e n e k	Ibu
3	Cucu dan seterusnya kebawah	Anak laki-laki
4	Saudara laki-laki kandung	1. Ayah. 2. Anak laki-laki. 3. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
5	Saudara perempuan kandung	1. Ayah 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
6	Saudara laki-laki seayah	1. Ayah 2. Anak laki-laki. Cucu laki-laki (dari dari anak laki-laki) 3. Saudara laki-laki/ Perempuan seayah dan seibu

7	Saudara Perempuan seayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah. 2. Anak laki-laki. 3. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) 4. Saudara laki-laki / Perempuan kandung
8	Saudara Laki-laki seibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) 4. Anak perempuan 5. Anak perempuan dari anak laki-laki.
9	Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) 4. Kakek 5. Saudara laki-laki kandung 6. Saudara laki-laki Seayah. 7. Saudara perempuan kandung 8. Saudara perempuan seayah
10	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah	1. Terhijab oleh 8

		<p>macam orang tersebut diatas</p> <p>2. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung</p>
11	Paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu seayah dengan ayah	<p>1. Terhijab oleh pont 10 diatas.</p> <p>2. Anak laki-laki dari saudar laki-laki seayah</p>

I. Golongan Ahli Waris dan bagiannya.

Keistimewaan ketentuan ahli waris dalam hukum waris Islam ialah bagian untuk ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris¹³

a. Golongan Dzawil Furudl

Golongan dzawil furudl adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini sudah ditetapkan dengan jelas dalam Al Qur'an (QS An-Nissa 7, 11, 12, 33, dan 176)

Mereka dapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam Al Qur'an adalah;

¹³ H. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Op.cit*

a. Anak perempuan.

$\frac{1}{2}$ harta warisan apabila hanya seorang tidak ada saudara laki-laki yang menariknya sebagai Ashobah.

$\frac{2}{3}$ harta warisan apabila dua orang saudar atau lebih dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya sebagai Ashobah.

Tertarik ashobah karena ada anak laki-laki yang menariknya.

b. Ibu.

$\frac{1}{6}$ harta warisan apabila ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari seorang saudara.

$\frac{1}{3}$ harta warisan apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari seorang saudara atau setelah diambil bagian suami atau isteri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau isteri.

c. Bapak.

$\frac{1}{6}$ apabila ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Ashobah bila tidak ada anak dan cucu.

d. Suami (duda)

$\frac{1}{4}$ apa bila ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki.

$\frac{1}{2}$ apa bila tidak ada anak maupun cucu seperti diatas.

e. Isteri (janda)

$\frac{1}{8}$ apabila ada anak termasuk cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.

$\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak atau cucu seperti tersebut diatas.

f. Cucu perempuan dari anak laki-laki

$\frac{1}{2}$ apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.

$\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.

$\frac{1}{6}$ untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan.

g. Saudara perempuan kandung

$\frac{1}{2}$ apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.

$\frac{2}{3}$ untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.

Ashobah karena adanya saudara laki-laki kandung dan kakek yang menariknya.

h. Saudara perempuan seayah

$\frac{1}{2}$ apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya sebagai ashobah.

$\frac{2}{3}$ apabila tidak ada ayah, anak, cucu, saudara kandung atau tidak ada yang menariknya sebagai ashobah.

Ashobah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek (ketentuan bagian yang menariknya adalah 2kali lebih besar darinya)

$\frac{1}{6}$ apabila ada saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$.

i. Saudara laki-laki dan perempuan seibu.

$\frac{1}{6}$ apabila hanya seorang tidak ada ayah, kakek anak atau cucu dari anak laki-laki.

$\frac{1}{3}$ apabila ada saudara seibu satu atau lebih apabila tidak ada, ayah, kakek, anak, cucu dari anak laki-laki .

j. Kakek (bapak ayah)

Ketentuan bagian kakek sama seperti ketentuan ayah apabila ayah tidak ada.

k. Nenek.

Nenek terdiri dari dua golongan yaitu nenek dari garis Ibu dan nenek dari garis Ayah.

$\frac{1}{6}$ apabila seorang atau lebih dari dua golongan tersebut

2. Golongan Ashobah

Golongan ahli waris ashobah ialah golongan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadang kala dapat bagian sisa kalau ada ahli waris dzawil furudl, kadang kala tidak menerima sama sekali jika tidak ada harta tidak tersisa, tetapi dapat juga menerima harta warisan seluruhnya jikalau tidak ada ahli waris dzawil furudl.

Ada dua macam golongan ashobah yaitu :

a. Ashobah bin nafsih

Yaitu kelompok ashobah dengan tanpa ditarik oleh waris ashobah yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi ashobah

Seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara sekandung dan seayah, serta paman.

b. Ashobah bil-ghairi

Yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris ashobah harus ditarik oleh ahli waris ashobah yang lain.

Seperti: anak perempuan ditarik oleh menjadi ashobah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau seayah.

3. Golongan Dzawil Arham

Golongan ahli waris dzawil arham adalah golongan orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkanya. Dalam patrilinealisme merupakan golongan ketiga. Pengertian ini khusus dikenakan pada hubungan darah pada garis wanita saja, sebagai kebalikan dari pengertian ashobah yang khusus dihubungkan dengan garis laki-laki.

Ada tiga Mahzab yang mengemukakan masalah dzawil arham ini yaitu :

1. Mahzab ahlirrahim yang menyatakan bahwa dzawil arham yang ada baik yang dekat maupun yang jauh hubungannya dengan pewaris tanpa dibedakan laki-laki atau perempuan
2. Mahzab Ahlittanzil yaitu berpendapat bahwa dzawil arham harus diberikan kedudukan seperti dzawil furudl dan ashobah
3. Mahzab Ahlilqarobah yang memperhatikan jauh dekat hubungan pewaris, kemudian memperhatikan kuat lemahnya, diqiyaskan kepada jenjang urutan waris ashobah yang ditentukan adalah laki-laki yang terdekat dengan pewaris.

Mahzab ini membagi dzawil arham kedalam 4 golongan:

- a. Golongan kerabat yang bernasab dengan pewaris.
- b. Golongan kerabat yang menjadi sandaran nasab pewaris.
- c. Golongan kerabat yang bernasab kepada kedua orang tua pewaris.
- d. Golongan kerabat yang bernasab kedua kakek nenek pewaris.

4. Golongan Penerima Wasiat

Yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam pengertian yang luas ialah suatu pernyataan seseorang (pewasiat), baik yang dilakukan secara lisan atau dihadapan dua orang saksi atau secara tertulis dihadapan dua orang saksi, maupun dihadapan Notaris, tentang apa yang dikehendaki pewasiat meninggal dunia. Pewasiat berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.

Untuk anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat maka keduanya akan mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ harta warisan .

J. Tinjauan Umum PERADILAN AGAMA.

1. Tujuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tujuan kelahiran Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tidak semata-mata dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum, akan tetapi ada lagi tujuan-tujuan yang lebih jauh yang dapat diamati dalam rumusan konsideran praturan yang dimaksud, dengan mengamati sejarah perjalanan panjang Peradilan Agama dalam rangka penegakan hukum Islam di Indonesia.

Adapun tujuan lebih jauh tersebut adalah:

1. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman.

Dalam rumusan konsideran huruf c dirumuskan bahwa "salah satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama," sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (jo UU no 35 Tahun 1999) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama.

Dalam konsideran huruf d disebutkan "Perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam rangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Hal ini disebabkan karena selama ini pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama masih beraneka ragam, seperti Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stb Tahun 1882 No 152, Stb 1937 No 116 dan 610), Praturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk Residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stb 1937 No 638 dan 639), serta Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah diluar pulau Jawa dan Madura.

3. Memurnikan Fungsi Peradilan Agama.

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil dan legalistik Peradilan Agama diberikan kekuasaan melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, tetapi secara realistik, semu, lumpuh dan

pincang karena setiap putusan yang akan di eksekusi harus memintakan pengukuhan terlebih dahulu (*Executorial verklasing*) dari Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Agama tidak punya wewenang dalam mengeksekusi putusannya sendiri atas alasan dia tidak mempunyai perangkat juru sita.

2. Sejarah Berlakunya Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak satu abad yang lalu yang keberadaan dasar hukumnya sangatlah sederhana yang disepakati untuk pertama kali mulai tahun 1882 yaitu ditetapkannya peraturan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang Peradilan Agama yaitu S.1882 no 152. Dalam peraturan tersebut ruang lingkup Peradilan Agama hanya sebatas Jawa dan Madura. Kemudian setelah itu masih dalam pemeritahan Kolonial Hindia Belanda ditetapkan S.1937 no 638, 639 yang mengatur "kerapatan Qodli" dan kerapatan Qodli besar untuk sebagian daerah Kalimantan Selatan.

Pada Zaman Orde Baru di hasilkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Implementasinya dengan lahirnya peraturan ini Peradilan agama benar-benar berada seiring dengan pengadilan lainnya yaitu **Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan**

Agama. Meskipun demikian Kompetensi Peradilan Agama di tiap daerah masih sering terjadi perbedaan. Peradilan Agama di Jawa dan Madura tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus Kewarisan dan putusan kewarisan masih dipegang oleh Pengadilan Negeri.

Baru pada tahun 1989 ditetapkan Undang-Undang Peradilan Agama yang tatanan Kompetensinya sangat jelas dimana setiap daerah mempunyai kuasa yang sama

3. Landasan Konsitusional Peradilan Agama

Setiap peraturan yang akan di undangkan pasti mempunyai landasan hukumnya atau setidaknya tidaknya mengisi suatu praturan perundang-undangan yang telah ada serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya pasti juga tidak bertentangan dengan norma yang hidup ditengah masyarakat. Tetapi kenyataannya pada saat peraturan ini di godok bukannya tidak ada hambatan-hambatan dengan dihembuskanya isu-isu yang dikaitkanya dengan sindiran Neo Piagam Jakarta. Hingga Menteri agama pada waktu itu menyatakan bahwa Peradilan Agama itu adalah sebuah lembaga peradilan yang terdapat di sebuah Negara Panca sila, bukan dinegara Islam¹⁴ Artinya keberadaan Peradilan Agama jangan dikait-kaitkan dengan isu pendiskriminasian

¹⁴ **Munawir Sadzali.***Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia (Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)* UII Pres. Yogyakarta 1993

suatu agama, sebab berdiri Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 bukannya tanpa Landasan Konstitusi Menurut pendapat Prof. DR. M.Mahfud MD, SH ada tiga landasan Konstitusi dari Peradilan Agama yang tanpa harus mengaitkan isu Piagam Jakarta yaitu **Pancasila dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959**¹⁵ Berikut Landasan konstitusi tersebut:

Pancasila

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber konstitusi berlakunya Peradilan Agama. Menurut pendapat Prof. Hazairin mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara maka hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas konstitusional untuk berlakunya sekaligus meruntuhkan teori Receptie yang dahulu dipakai sebagai dasar kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Menurut pandangan ini bukan hanya Peradilan Agama Islam saja yang dapat dilembagakan namun agama-agama lainpun dapat dilembagakan, tetapi perlu di ingat untuk pelebagaan suatu jenis peradilan dituntut syarat Materiil dan Formiil yang kuat untuk sementara ini hanya Islam memiliki kedua syarat mutlak tersebut.

¹⁵ Prof.DR Mohammad Mahfud MD, SH *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia (Peluang Konstitusi Bagi Peradilan Agama)* UII Pres. Yogyakarta 1993

Dekret Presiden 5 Juli 1959

Dalam dekrit tersebut yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan sila pertama Pancasila mendapat tambahan *"..kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya..."*. Atas landasan ini berlakulah hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Tetapi upaya Piagam Jakarta tersebut selalu mendapat tantangan. Kontroversi ini pada akhirnya terjawab dengan keluarnya Inpres Nomor 12 tahun 1968 tentang kembalinya Pancasila yang dipakai dalam pembukaan UUD 1945. Ada atau tidak ada Piagam Jakarta Peradilan Agama tetap ada peluang untuk berdiri yaitu UUD 1945.

Dengan demikian jika melihat dari sejarah ternyata Peradilan Agama di negara Pancasila ini pertama kali mendapat legalitas dari Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikuatkan oleh praturan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 dimana dalam peraturan tersebut menghapuskan semua peradilan-peradilan adat kecuali Peradilan Agama (pasal 1 ayat 2) diterus dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan secara tegas bahwa menyebutkan ada empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer,

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Jadi lahirnya Peradilan Agama sebenarnya tidak ada kaitanya dengan Piagam Jakarta. sama sekali.

4. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Darurat menurut peraturan-praturan Republik Indonesia dahulu yang ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam Daerah Indonesia dahulu .

Sedangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan " Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."Maka sumber hukum yang berlaku di Peradila Acara adalah:

1. Het Herziene Indonesiech Reglement (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: St 1848 no 16. Stb 1941 no 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
2. Rechtreglement Buitengewesten (RBg. Atau Reglement daerah seberang: Stb 1927 no 227) untuk luar Jawa dan Madura.

3. Reglement op de Burgelijk Rechtvordering (RV Reglement Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa: Stb 1847 no 52, 1849 no 63)
4. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang juga memuat juga beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata.
5. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Yurisprudensi.

5. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama.

1. Asas Personalitas Keislaman.

Yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam (pasal 2 penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 2). Tapi penafsiran hakim dapat saja lebih luas seperti dalam hal sengketa kepemilikan harta warisan yang di kuasai oleh orang non muslim, tetapi harta warisan tersebut berasal dari orang muslim, maka orang non muslim tersebut dapat saja di gugat di

UPT-PUSTAK-UNDIP

Peradilan Agama.¹⁶ Asas ini adalah merupakan titik sentral Peradilan Agama di Indonesia

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan kehakiman adalah asas paling sentral dalam kehidupan peradilan. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh campur tangan pihak ketiga. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 1 UU No 14 Tahun 1970).

3. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini dikenal dengan asas *Nemo iudex sine Actore* yang artinya kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Inisiatif bukan dari hakim, ada atau tidak ada suatu perkara tapi datang dari pihak yang berperkara. Konsekwensinya hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukannya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas (pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970), dan hakim mengadili berdasarkan hukum (pasal 5 ayat 1 No. 14 Tahun 1970).

4. Hakim Pasif

Pada perkara perdata hakim bersifat pasif artinya luas pokok sengketa ditentukan oleh mereka yang berperkara, hakim hanya

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs Saifuddin Jumat tanggal 24-10-2003

membantu mencari keadilan untuk mencapai keadilan (pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970). Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang dapat diterapkan dengan benar oleh pihak-pihak yang berperkara.

5. Terbukanya Persidangan.

Persidangan terbuka untuk umum yang tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, obyektifitas, pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil (pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

Penetapan dan Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 60 UU No 14 Tahun 1970).

6. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam persidangan hakim ada dtengah-tengah kedua pihak yang berpekara. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Asas *Audi et Alteram Partem* yaitu kedua pihak harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing, hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

7. Putusan Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili (pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 319 HIR).

Selanjutnya Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Alasan tersebut merupakan pertanggung jawaban hakim, nilai obyektif yang telah dilaksanakan hakim yang mengadili perkara.

8. Beracara Dikenakan Biaya

Bahwa untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 182 HIR). Untuk itu maka peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

9. Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.

Sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan sederhana formalitasnya.

Cepat adalah jalanya baik dimuka sidang, penyelesaian acara sampai putusan hakim.

10. Tidak ada keharusan Mewakikan.

Para pihak tidak ada keharusan untuk mewakilkan perkaranya di Pengadilan Agama dengan menguasakan kepada pengacara untuk

beracara di Pengadilan. Pihak dapat beracara sendiri didepan hakim Pengadilan Agama apabila dia merasa mampu untuk beracara sendiri.

6. Kedudukan dan Kekuasaan Pengadilan Agama dan Perangkat Pengadilan Agama

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mewujudkan terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam rangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dengan lahirnya peraturan tersebut juga mengusung tujuan yaitu mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman, serta menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama, memurnikan fungsi Peradilan Agama.

a. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Sadaqah.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa : Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku ketentuan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 ayat (2)

1. Izin poligami.
2. Izin melangsungkan perawinan bagi orang yang belum usia 21 tahun, dalam hal orangtua, wali atau keluarga berbeda pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai pencatat nikah.

6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan cerai.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi nya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penhidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencahutan kekuasaan orang tua.
16. Penunjukan kekuasaan wali dicabut.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.

20. Penetapan asal-usul seorang anak.

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjalankan menurut peraturan lain.

Mengenai Kewarisan sebagai mana dinyatakan dalam ayat (3) yaitu Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah menentukan siapa-siapa ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta waris.

Pada pasal 50 mengenai kekuasaan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan objek yang menjadikan sengketa, disebut bahwa " dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagai mana yang dimaksud dengan dalam pasal 49 tersebut, maka mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh lingkungan Peradilan Umum.

Dalam penjelasan pasal 50 dikemukakan, bahwa penyelesain terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang menjadi sengketa.

c. Fungsi dan kedudukan Perangkat Peradilan Agama dalam masyarakat

Kedudukan Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tertuang dalam pasal 2.

Bagi Peradilan Agama selain kekuasaan pengadilan sebagai tertuang dalam pasal 49, juga diberikan tugas dan wewenang lain yaitu dapat memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa bila diminta oleh instansi pemerintah tersebut yang tertuang dalam pasal 51 ayat 1.

Untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, tentu dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Pengadilan Agama seperti Ketua atau Hakim serta pejabat Kepaniteraan dan tidak kalah penting para pejabat Kesekretariatan.

Para pejabat Pengadilan Agama tersebut diatas dapatlah dikategorikan sebagai ULAMA dari tipe pejabat Agama.¹⁷

Hakim di lingkungan Peradilan Agama merupakan ulama dari tipe pejabat agama, yang telah beralih menjadi Hakim Negara. Kedudukannya beralih dari Subordinasi, sebagai penasihat penyelenggara menjadi

¹⁷ Drs.MS. H. Cik Hasan Bisri Ulama dan Peradilan Agama. Mimbar Hukum no 26 Tahun VII Mei-Juni, Al Hikmah Ditbinbapera Islam.Jakarta hal 85.

superordinasi, yang merupakan pelaksana kekuasaan negara. Ia dituntut untuk menampakan ciri-ciri keulamaannya dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai penegak hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Karena hakim Peradilan Agama sebagai ulama dan Pejabat Agama, maka sangatlah tepat apabila Pengadilan Agama memberikan keterangan, nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di Instansi Pemerintahan di daerah hukumnya apabila hal itu dimintakannya.

Tidak dipungkiri dalam kenyataan membuktikan bahwa permasalahan yang baru dan temuan yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak timbulnya permasalahan-permasalahan baru pula yang tentu memerlukan jawaban-jawaban baik ditinjau dari segi hukum pada umumnya maupun dari segi hukum Islam pada khususnya.

Tuntutan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia dalam lingkungan dan jajaran Peradilan Agama haruslah membuktikan perannya yang ganda, sebagai penegak hukum dan keadilan juga sebagai Ulama dengan menampakan ciri keulamaannya di tengah-tengah masyarakat.

L. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah adalah peraturan materiil yaitu dasar pengambilan keputusan bagi hakim dilingkungan Pengadilan Agama. Landasan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 yaitu Pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang pada akhirnya melahirkan Kompilasi Hukum Islam ini. Menurut pendapat Prof. H. Zaini Dahlan, MA mengenai pengertian Kompilasi Hukum Islam yaitu adalah sekumpulan peraturan ketentuan Islam yang selama ini sudah dipakai dan dilaksanakan di Indonesia, yang hanya menyangkut masalah hukum perkawinan, waris, dan wakaf.¹⁸

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan Hukum di Indonesia

Sudah bukan rahasia lagi pada saat belum lahirnya Kompilasi Hukum Islam bahwa hakim Pengadilan Agama yang umumnya lebih dari satu abad lamanya selalu memberikan suatu keputusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama dengan hakim yang berbeda, hal itu dikarenakan

17. Prof.H. Zaini Dahlan, MA. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia (Kondisi Kesadaran Umat Islam kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama)*. UII Pres. Yogyakarta.1993

pada waktu itu belum adanya keseragaman pedoman petunjuk materiil dalam penanganan kasus, sehingga lahirlah keputusan yang tidak mempunyai kepastian yang tetap, dari sudut teori hukum artinya produk-produk vonis peradilan agama tidak memberikan kepastian hukum, namun setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam hal itu diharapkan akan terkikis sedikit-demi sedikit.

Kompilasi Hukum Islam adalah suatu produk hukum yang terbentuk atas dasar Instruksi Presiden dan direspon cepat oleh Menteri Agama pada waktu itu untuk membentuk sebuah praturan hukum Islam untuk disebarkan kepada Instansi pemerintahan dan masyarakat yang membutuhkannya. Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah praturan perundang-undangan yang diajukan oleh eksekutif didepan Lembaga Legislatif atau sebaliknya tetapi hanya sebuah keputusan setingkat Menteri dan konsekwensi hukumnya adalah sebuah Pedoman yang keberadaannya sedikit tidak mempunyai daya paksa. Jadi hakim dalam penentuan keputusan masalah hukum Islam tidak terikat harus menggunakan Kompilasi Hukum Islam tersebut dikarenakan oleh statusnya tersebut. Namun Kompilasi Hukum Islam dalam penetapannya berlandaskan pada Instruksi Presiden sedangkan Inpres itu sendiri berkaitan erat dengan Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Presiden diberi

kewenangan untuk menetapkan peraturan-praturan (*pouvoir reglementair*) dan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan. Jadi ada semacam Atributisi langsung dari Konstitusi Negara kepada Presiden yang secara tidak langsung erat kaitannya antara Konstitusi kepada Kompilasi Hukum Islam, jadi dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dasar Konsitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1)

Jadi ada alasan kuat mengapa hakim-hakim agama tetap berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam karena kedudukannya kuat walaupun secara hirarki perundang-undangan hal itu tidak sekuat peraturan yang ada di atasnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dibidang hukum, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian dalam tulisan ini merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum. Penelitian dibidang ilmu hukum memiliki berbagai jenis dan tipe ini berdasarkan dari sudut mana orang peneliti itu melihatnya. Penentuan jenis penelitian sangat penting karena hal ini berkaitan erat dengan sistematika dan metode serta analisis data yang akan dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai obyektifitas dan validitas yang tinggi.

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang maksudnya pendekatan berdasarkan praturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan di teliti yang berdasarkan atas kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

Penelitian ini oleh penulis menggunakan metode kualitatif, penggunaan metode ini dirasa sangat membantu penelitian ini dikarenakan pendekatan metode penelitian ini adalah yuridis normative. Penggunaan metode kualitatif ini diharap akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek yang akan diteliti. Makna-makna yang akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah pembagian warisan setelahnya berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui hambatan para pemutus perkara dan hambatan penerapan peraturan tersebut di Kabupaten Sleman yang nota bene sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam dan masih memegang teguh keberadaan Hukum adat Jawa. Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dalam latar yang wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah ini penelitian diarahkan untuk mengungkapkan keberadaan Peradilan Agama ditengah masyasrakat adat Jawa yang beragama Islam serta dalam pelaksanaan pembagian waris hukum Islam beserta hambatan-

hambatannya baik dari perangkat hukumnya maupun penerapan materi hukumnya ditengah masyarakat beragama Islam tetapi masih berpegang teguh pada hukum adat Jawa.

Sanapiah Faisal menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan, tingkah laku sosial dan budaya.¹⁹

Selain hal-hal tersebut diatas penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Mudah dalam penyesuaiannya jika berhadapan dengan kenyataan ganda;
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dan responden;
3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dasar dan Aplikasi*. Yayasan Asih Asah Asuh, Malang 1990.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1995.

pembagian waris menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta hambatan para pengambil keputusan di Peradilan Agama dan hambatan penerapan hukum materiilnya

C.Lokasi Penelitian

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan dana dalam penelitian maka dirasa perlu untuk menetapkan lokasi, penetapan lokasi ini didasarkan kepada kesanggupan dan kemampuan peneliti dalam menjangkau keberadaannya (lokasi). Lokasi yang dipilih dan ditetapkan sebagai wilayah dari objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sleman di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Sampel dan Teknik Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat beragama Islam di Kabupaten Sleman

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Agama Sleman.

2. Masyarakat yang pernah mengalami pembagian warisan di Pengadilan Agama Sleman.
3. Praktisi hukum lainnya seperti Pengacara atau Advokat

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Aturan pemilihan teknik ini adalah keterbatasan waktunya, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

E. Sumber Data

Pada penelitian hukum normative yang ditunjang sosiologi hukum maka sumber data yang diperlukan bersifat data skunder serta data primer.

Pada data primer (*Field Research*) meliputi tata cara pemeriksaan sampai keputusan perkara oleh Hakim Pengadilan Agama dan hambatan-hambatannya dalam penerapan hukumnya. Sedangkan data sekunder (*Library Research*) berupa undang-undang, putusan-putusan pengadilan, literatur-literatur, dan sumber-sumber pustaka lainnya. Selain data skunder dan data primer penulisan ini juga ditunjang oleh data tertier yaitu data yang melengkapi dalam pemahaman data

skunder dan data primer yang diperoleh dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, surat kabar dan majalah.

F.Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.²¹

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

c. Studi Dokumen

Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data skunder, pertama mempelajari peraturan hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih mana yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

d. Wawancara

baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada

²¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung. 1992,

daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

e. Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan di Pengadilan Agama Sleman.

G. Teknik Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan pengiterprestasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

²² Soerjono Soekanto, *op cit.*.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²³

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²³ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press-Surakarta, 1998,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tatacara Pembagian Warisan di Pengadilan Agama.

Masalah kewarisan menurut hukum Islam tidaklah begitu menyita perhatian bagi masyarakat baik itu bagi masyarakat awam maupun praktisi, hal ini terbukti masih sedikitnya perkara warisan yang masuk dan ditangani Peradilan Agama, paling tidak perbandingannya dengan perkara perkawinan.

Untuk masyarakat awam yang telah mengusung tradisi adat istiadat turun temurun dari nenek moyang mereka dalam hal kewarisan mereka lebih cenderung menggunakan hukum adat mereka walau mereka sendiri telah menyatakan dan memeluk agama Islam sejak mereka lahir hingga mengerti ajaran-ajaran Islam. Mereka merasa pembagian waris dengan menggunakan hukum adat mereka lebih adil dan bijaksana, terlebih dari itu dengan membagi waris dengan hukum adat berarti ikut melestarikan adat budaya mereka. Ada lagi yang mengatakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam jika dikaitkan dengan jumlah porsi yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Mungkin dengan berdasarkan hukum

adat pembagian waris dipandang lebih adil karena tidak membedakan antara waris anak laki-laki maupun waris anak perempuan.²⁴

Oleh sebab itu mereka sangat enggan untuk mempelajari ilmu waris Islam (*Faraidh*) yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, meski mereka mengaku beragama Islam tapi mereka banyak yang tidak mengetahui tata cara pembagian waris menurut hukum Islam.

Selain itu dilupakannya ilmu waris Islam tersebut oleh masyarakat, disebabkan pengaruh pada zaman penjajahan pemerintah Belanda yaitu sejak tanggal 1 April 1937, pemerintah Belanda tidak mengakui lagi ilmu Faraidh kecuali tentang ilmu nikah, talak dan cerai.

Padahal dalam mempelajari ilmu waris itu hukumnya wajib, bahkan kalau tidak mengetahui ilmu faraidh, diancam oleh Allah masuk neraka terlebih lagi kalau kita salah dalam penerapannya, tapi sebaliknya kalau kita paham dan benar dalam penerapan waris, ganjaranya dari Allah adalah surga²⁵

Untuk pembagian waris dalam hukum Islam memang berlandaskan keikhlasan dari para ahli waris meski ada kelebihan dan kekurangan dalam pembagian. Faktor keikhlasan itu juga diambil dalam baik dalam penetapan dan dalam putusan waris di Pengadilan Agama.

²⁴ Retno Supartinah, *Penggunaan Pilihan Hukum dalam Pengajuan Sengketa Waris bagi Orang Islam Sesudah Berlakunya UU No. 7/1989*. *Mimbar Hukum* edisi No 125/XII/1996.

²⁵ H. Ghufroon. *Banyak Orang Islam Tidak Tahu Hukum Waris* *Suara Merdeka* 26 September 2003.

Pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan *"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"*. Yang berlaku khusus adalah perkara-perkara dalam bidang perkawinan saja, namun selain itu berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Maka pembagian warisan yang diajukan para pihak terkait erat pada pasal 45 tersebut dalam hal acara pemeriksaan perkara.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama , dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam yang menyangkut bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang berhak mewaris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Untuk pelaksanaan pembagian karena adanya sengketa dapat dibagi lagi yaitu.

a. Pembagian berdasarkan Permohonan

Permohonan menurut pengertian umum ialah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dimana terdapat satu pihak saja. Tetapi di Pengadilan

Agama ada suatu kekhususan yaitu adanya permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, seperti permohonan cerai talak, izin Poligami yang didalamnya ada pihak pemohon dan ada yang termohon²⁶

Adapun ciri-ciri Permohonan pada Umumnya yaitu;

1. Acara permohonannya bersifat Valutair.
2. Hanya satu pihak saja yang berkepentingan.
3. Tidak adanya sengketa.
4. Dikehendaki dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Putusan yang dijatuhkan berupa Penetapan.
6. Upaya hukumnya adalah kasasi.

Pada pasal 107 ayat (2) memberikan pengertian bahwa penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan luar sengketa antara orang-orang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam perkara permohonan pembagian warisan oleh para pihak, dapat dilakukan di Pengadilan Agama dengan memintakan kepada hakim atau perangkat Pengadilan Agama lainnya untuk memberikan arahan, nasihat, penjelasan serta penyelesaiannya hingga akhirnya di buatkan suatu penetapan yang berisikan menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1990

Perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung unsur sengketa yang diajukan oleh ahli waris kepada hakim Pengadilan Agama melalui panitera Pengadilan Agama untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pengajuan permohonan tersebut bisa dilakukan perorangan maupun secara bersama-sama yang berangkat dari kesepakatan antara mereka sejak dari rumah.²⁷

Karena adanya unsur kesepakatan tersebut dari ahli waris maka hakim berhak memanggil semua ahli waris tanpa terkecuali apapun. Ketidakhadiran seorangpun ahli waris tanpa kuasa, maka hakim tidak akan melakukan pemeriksaan apalagi sampai menetapkan bagian masing-masing, kecuali ketidakhadiran tersebut dapat dikuasakan kepada ahli waris yang lain atau pengacaranya dengan kuasa khusus.

Adapun tata cara permohonan penetapan waris di Pengadilan Agama Sleman yaitu, para ahli waris membuat surat permohonan yang didalamnya berisikan:

- a. Identitas para ahli waris seperti nama, umur, pekerjaan, agama, alamat.
- b. Menyatakan bahwa nama-nama yang ada identitas tersebut adalah sebagai ahli waris dari yang meninggal.
- c. Hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.

²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs. Saifuddin. Hakim pada hari Sabtu 25-10- 2003.

Mengenai bukti-bukti yang mendukung keabsahan surat pernyataan tersebut seperti:

- a. Kartu tanda penduduk masing-masing ahli waris.
- b. Kartu keluarga.
- c. Surat keterangan kematian.
- d. Surat keterangan dari Instansi pemerintahan (jika dianggap perlu).
- e. Sertifikat tanah, Deposito, Tabungan Bank, Perjanjian Kredit, Saham, Obligasi dan lain-lain.

Surat-surat tersebut diatas seterusnya di fotocopy dan dilegalisasi oleh Badan atau instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut diatas, lalu fotocopi-fotocopi tersebut ditempelkan materai secukupnya. Untuk mempertegas keabsahan surat-surat tersebut maka surat-surat aslinya harus ditunjukkan kepada Hakim Pengadilan Agama yang memeriksanya, ketiadaan aslinya tersebut maka oleh hakim tidak akan dilanjutkan kecuali para ahli waris mengajukan saksi. Pengajuan saksi diperlukan karena untuk melengkapi pemeriksaan pembuktian apa bila alat bukti dirasa belum cukup memadai.

Contohnya :

Bila harta warisan tersebut berupa benda yang kepemilikannya memerlukan alat bukti yang otentik tetapi bukti tersebut tidak ada sama sekali seperti sebidang tanah yang tidak memiliki sertifikat, maka saksi disini sangat perlu

dibutuhkan seperti tetangga yang berbatasan langsung atau tidak dengan sebidang tanah tersebut, kepala desa, camat, atau perangkat pemerintahan lainnya.

Jika ternyata tidak ada saksi sama sekali maka pihak Pengadilan melakukan:

-Sidang ditempat,

Sidang ditempat gunanya mencari data-data kebenaran terhadap kepemilikan hak dari objek harta peninggalan tersebut.

Sidang ditempat adalah sidang yang dilakukan oleh tiga orang hakim di tempat harta warisan tersebut (tanah) berada.

Sidang ditempat dilakukan oleh 3 orang hakim dan melibatkan Kelurahan, Juru sita, Panitera pengganti serta saksi-saksi lain yang mendukung.

-Pemeriksaan.

Pemeriksaan gunanya untuk mengecek kebenaran objek warisan, jika dirasa surat permohonan dianggap telah lengkap dan alat bukti sudah dianggap cukup serta bila saksi yang diajukan dan diperiksa telah memadai unsur-unsurnya, maka oleh hakim Pengadilan Agama dibuat suatu penetapan atau akta komparisi pembagian waris yang bagian masing-masing tergantung dari kesepakatan para ahli waris. Surat pengesahan atau Akta warisan diberi nomor dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pentingnya suatu penetapan dan akta komparisi pembagian warisan tersebut adalah dapat digunakan untuk pengambilan uang dibank, pencairan dana deposito bank, balik nama sertifikat tanah hak milik dan lain sebagainya.

Pengertian suatu penetapan adalah suatu produk peradilan yang melalui suatu tahap Acara pemeriksaan dengan mengajukan permohonan dari salah satu ahli waris atau bersama-sama dengan mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi penguat dan selanjutnya oleh hakim dibuat suatu penetapan yang dimulai dengan irah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" serta menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Untuk sementara ini di Pengadilan Agama Sleman pada perkara permohonan Penetapan belum pernah dilaksanakan dan bila ada permohonan yang masuk hanya dibuatkan Akta Komparisi pembagian waris saja. Akta Komparisi Pembagian waris adalah suatu akta berbentuk komparisi yang memuat hanya komparan-komparan para ahli waris dimana didalamnya hanya sebatas pengesahan harta warisan yang akan diambil (Deposito, Tabungan Bank) dan para ahli waris yang disahkan oleh ketua Pengadilan Agama. Akta Komparisi Pembagian Waris tidak melalui tahap pemeriksaan layaknya sebuah acara pemeriksaan di Pegadilan.

Untuk lebih lanjut mengapa penetapan di Pengadilan Agama belum pernah terlaksanakan ada beberapa penafsiran dari para hakim yang bertugas disana yaitu Menurut Drs. H.A Mukti Arto, SH. Perkara waris yang tidak bersifat mengandung sengketa untuk menetapkan suatu permohonan yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama yaitu tidak hanya hakim saja dapat melakukannya namun perangkat-perangkat lain di Pengadilan Agama seperti selain hakim Panitera atau Kasekretariat juga dapat melakukannya, dalam memberikan penetapan tersebut kedudukan perangkat tersebut hanya di pandang sebagai perangkat pegawai negeri sipil biasa atau sebagai Ulama, ketentuan tersebut di sebabkan sifat dari perkara itu sendiri yang tidak mengandung sengketa dan menurut penafsirannya tidak perlu diadakan acara seperti layaknya sebuah sengketa.²⁸

Namun setelah di putuskan Surat Edaran TUADA UDILAG MARI ketentuan penetapan permohonan harus di adakan acara dan wajib ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama seperti halnya penetapan permohonan poligami, wali adlol yang walau pun hanya bersifat valuntair namun penerapan itu harus menurut prosedur pemeriksaan oleh hakim Pengadilan Agama.

²⁸ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sleman Drs.H.A.Mukti Arto, SH. Tanggal 25-Oktober 2003.

b. Pembagian Berdasarkan Putusan.

Pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama bisa dilaksanakan setelah adanya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terhadap putusan hakim tersebut tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan hakim artinya perkara tersebut adalah perkara yang mengandung sengketa yang diajukan kemuka hakim untuk diperiksa sampai di putuskan oleh hakim. Kesimpulannya bahwa adanya sesuatu hak dari pengugat yang dilanggar oleh tergugat, maka oleh penggugat dalam tuntutan pokoknya atau tuntutan pengganti (*ex Aquo et Bono*) untuk meminta bagian haknya kepada tergugat melalui putusan hakim yang akan memutuskannya kelak.

Perkara warisan yang mengandung unsur sengketa yang paling banyak ditemukan di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara kepemilikan. Perkara kepemilikan yaitu suatu perkara dimana seseorang atau Badan baik bersama orang lain atau badan lainnya menguasai objek warisan atau diduga objek warisan dan oleh ahli waris menuntut kepada orang atau Badan yang menguasai tersebut akan bagian haknya kepada Pengadilan Agama.²⁹

²⁹ Seseorang atau Badan yang menguasai harta warisan yang belum terbagi biasanya kalau di Pengadilan Agama akan menjadi TERGUGAT, sedangkan orang lain dan Badan lainnya yang ikut meukmati harta warisan sebagai TURUT TERGUGAT, dan orang yang menuntut haknya adalah PENGGUGAT.

Orang atau Badan yang menguasai objek warisan adalah orang yang sepeninggal pewaris belum pernah menyerahkan harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris dari sipewaris. Harta warisan tersebut mungkin dikuasai oleh orang atau Badan itu sendiri atau bersama orang lain yang telah menikmati bertahun-tahun, mereka tidak sadar apa yang mereka nikmati tersebut ada bagian orang lain yang ikut menikmatinya.

Sedangkan ahli waris yang menuntut adalah orang yang sebenarnya berhak atas bagiannya, tetapi bagiannya tersebut belum diberikan dari orang atau badan yang menguasai harta warisan tersebut.

Syarat-syarat pelaksanaan Pembagian waris yaitu:

- a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Artinya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi upaya banding dan kasasi. Suatu putusan yang sudah tertutup upaya banding dan kasasi, bisa terjadi apabila mengajukan permintaan banding dan kasasi sudah lewat batas waktunya.

- b) Putusan harus bersifat *Condemnatoir*.

Artinya selain telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan itu harus mengandung sifat menghukum untuk segera melaksanakan putusan. Putusan bersifat *condemnatoir* melekat sifat eksekutorial. Untuk putusan bersifat *declatoir* tidak mengandung sifat eksekutorial karena didalamnya tidak ada amar memrintahkan atau menghukum,

maka pengadilan tidak berwenang mengeksekusi. Untuk pelaksanaan putusan *declatoir* dapat dilaksanakan tergantung dari kerelaan para pihak.

Setelah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap segera oleh pihak-pihak melakukan pembagian waris. Pembagian waris tersebut dilakukan berdasarkan isi dari putusan tersebut baik itu siapa-siapa ahli warisnya yang mendapat bagian maupun bagian masing-masing ahli warisnya.

Apabila pihak terhukum tidak segera menyerahkan harta warisan yang menjadi sengketa tersebut kepada para untuk dilakukan pembagian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutuskan. Oleh Pengadilan Agama tersebut dibuat surat teguran (*Aan Manning*) kepada pihak terhukum untuk segera melaksanakan putusan tersebut.

Tetapi biasanya dalam praktek oleh hakim kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil ke Pengadilan Agama untuk di adakan negosiasi antara keduabelah pihak dan biasanya negosiasi itu sela menghasilkan kesepakatan para pihak, kesepakatan itu biasanya berisikan bagian-bagian yang akan diberikan pada masing-masing pihak, biasanya barang yang

akan dibagikan tersebut misalnya bagian si A mendapatkan rumah dan si B dapat mobil dan si C dapat Tanah dan lain seterusnya.³⁰

Hasil negosiasi yang menghasilkan kesepakatan tersebut dibuat Berita Acara, pentingnya Berita Acara adalah untuk syarat pemindahan hak seperti syarat peralihan hak milik atas tanah dari pewaris kepada ahli waris, untuk mencairkan Deposito dan mengambil Tabungan di Bank.

Apabila harus dengan eksekusi karena sifat putusnya adalah *condemnatoir* maka jika harta warisan yang hendak dibagi melalui kewenangan eksekusi, dan harta warisan berupa terdiri dari sejumlah uang dan beberapa rumah yang terletak pada satu lokasi yang sama, maka eksekusi dapat dengan mudah dilaksanakan secara nyata (*Eksekusi riil*) dengan membagi rata dan langsung menyerahkan pemilik dan penguasaannya kepada masing-masing ahli waris. Tetapi apabila ternyata barang-barang tersebut terdiri dari nilai-nilai yang berbeda setiap barangnya dan ahli warisnya tidak ada yang mau mengalah untuk saling memperhitungkan terhadap selisih kekurangan ataupun kelebihan, maka eksekusi ditempuh dua cara *pertama* dilakukan pelelangan (*executorial verkoop*) atas semua barang peninggalan, *kedua* baru setelah itu dilakukan eksekutor riil yakni membagi hasil pelelangan sesuai hitungan masing-masing.

³⁰ Wawancara *Ibid*

Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dan dibantu oleh dua orang saksi, sita eksekusi dilaksanakan ditempat obyek eksekusi. Sifat sita eksekusi tergantung dari jenis yang akan di eksekusi. Kalau yang akan di eksekusi tersebut berupa Deposito atau Tabungan maka jurusita terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan pihak Bank yang bersangkutan. Oleh jurusita dihitung bagian masing-masing ahli waris berdasarkan keputusan hakim setelah selesai dibuatkan Berita Acara. Berdasarkan salinan Berita Acara tersebutlah Deposito atau Tabungan di Bank dapat dicairkan. Juga mengenai masalah tanah, oleh juru sita diadakan perhitungan dengan cara pengukuran, pengukuran tersebut gunanya untuk menentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Setelah perhitungan dianggap selesai maka dibuatkanlah Berita Acara yang kegunaanya untuk balik nama.

Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154RBg dan pasal 14 ayat(2) UU No. 14 Tahun 1970. Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian (*Acta van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua pihak untuk segera memenuhi isi perdamaian yangtelah dibuat mereka. Apabila terjadi perdamaian maka perkara tersebut dicabut lalu hakim membuat "penetapan" yang berisikan

perkara yang mengandung unsur sengketa tersebut telah dicabut oleh penggugat karena adanya perdamaian antara kedua belah pihak.

Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat di eksekusi. Apabila ada salah satu pihak tidak mau mentaati isi perdamaian, maka pihak lain dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dijalankan seperti halnya menjalankan putusan hakim biasa.

Untuk perkara perdata masalah warisan yaitu suatu sengketa masalah kebendaan maka hal ini dapat saja dijalankan. Para pihak yang telah melakukan perdamaian dalam hal pelaksanaan pembagian waris adalah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal-pasal perdamaian yang mereka inginkan, baik itu besarnya bagian masing-masing pihak maupun dalam hal-hal lain tergantung isi dari kesepakatan tersebut. Bagi para pihak yang melakukan perdamaian kenyataannya hampir sama dengan masalah permohonan penetapan pembagian warisan masing-masing, mereka ikhlas akan besar kecilnya bagian yang akan mereka terima dan jarang sekali terjadi eksekusi.

Terhadap Akta perdamaian tersebut para pihak sudah tertutup upaya-upaya hukum, sebab akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*Request Civil*), demikian juga akta

perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru dianggap perkaranya telah selesai.

TABEL PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

	PERMOHONAN	GUGATAN
SIFAT	Tidak ada unsur sengketa.	Ada unsur sengketa didalamnya.
Pihak	1. Terdiri satu pihak saja. 2. Salah satu ahli waris atau secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Agama.	Terdiri dua pihak yang bersengketa
ACARA	1. Jika memintakan Penetapan maka akan diadakan acara pemeriksaan layaknya seperti acara pemeriksaan pengadilan pada umumnya. 2. Jika hanya pembuatan akta	Harus dengan Acara di muka Pengadilan yang dipimpin oleh hakim ketua.

	Komparasi Pembagian warisan tidak di perlukan Acara	
Pelaksanaan Pembagian.	Karena adanya kesepakatan maka pelaksanaan dengan sukarela para ahli waris dengan dasar keikhlasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran pihak pihak terhukum untuk melaksanakan putusan hakim. 2. Eksekusi bila pihak terhukum tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3 Tergantung negosiasi antara para pihak setelah putusan dibacakan

B. Hambatan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.

Telah kita ketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dapat dilaksanakan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tersebut memungkinkan adanya hambatan-hambatan, untuk lebih jauh membahas hambatan-hambatan

yang akan timbul dalam pelaksanaan pembagia warisan tersebut, tidak salahnya penulis terlebih dahulu membahas kemungkinan kemudahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembagian warisan antara lain:

1. Ada Perkara Permohonan.

Pada perkara permohonan tidak adanya unsur sengketa dan hanya ada satu pihak yang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Pihak tersebut dimana telah terjadi kesepakatan dalam hal pembagian harta warisan sejak berangkat dari rumah mereka. Mereka menghadap ke Pengadilan untuk memintakan kekuatan hukum terhadap Hakim Pengadilan Agama setempat berupa akta atau penetapan.

Perkara permohonan inilah yang sangat mempermudah pembagian warisan, karena tidak perlunya perangkat Pengadilan Agama untuk lebih jauh turut campur tangan dalam pelaksanaan pembagian waris. Para pihak dengan ikhlas dan rela terhadap bagiannya masing-masing dan hal itu tidak dianggap suatu yang memberatkan justeru dengan pembagian seperti itu para pihak sadar bahwa harta warisan bukanlah hal yang perlu untuk disengketakan.

2. Adanya Perdamaian

Adanya perdamaian pada sidang pertama pada perkara yang mengandung sengketa waris sangat membantu terlaksanakannya suatu

pelaksanaan waris. Adanya perdamaian maka untuk persidangan selanjutnya tidak diperlukan lagi, para pihak sepakat dan sadar bahwa bagian masing-masing pihak dapat disepakati, dan kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk akta yang nama Akta Perdamaian. Point yang mempermudah dalam pelaksanaan pembagian sama dengan Perkara Penetapan diatas.

3. Adanya Negosiasi

Terjadinya negosiasi pada saat putusan telah dijatuhkan juga salah satu bentuk mempermudah pelaksanaan pembagian waris. Pada perinsipnya sama dengan perdamaian

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemabagian waris memang tetap ada. Dalam penelitian penulis menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembagian waris. Apabila terjadi hambatan pelaksanaan pembagian waris itu sama saja hambatan dalam menegakan hukum, sebab putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah bagian dari hukum. Hambatan pembagian waris biasanya terjadi saat dilapangan arti karena pembagian warisan tidak dilaksanakan maka atas permohonan eksekusi maka pada saat itu sering terjadi hambatan. Hambatan pelaksanaan pembagian waris berkaitan erat dengan hambatan-

hambatan eksekusi. Menurut Drs. Wildan Suyuthi Mustofa, SH.,MH hambatan tersebut dapat dibagi dua yaitu:

1. Hambatan bersifat teknis yuridis seperti
 - a. Perlawanan pihak ketiga dan perlawanan pihak tereksekusi.
 - b. Permohonan Peninjauan Kembali.
 - c. Amar putusan tidak jelas.
 - d. Obyek eksekusi adalah barang milik negara.
2. Hambatan yang bersifat non teknis yaitu adanya campur tangan pihak lain diluar pihak yang berperkara³¹

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemabagian waris dalam praktek di pengadilan Agama Sleman memang belum pernah ada namun secara teoritik hambatan tersebut tetap saja memiliki peluang, hambatan itu antara lain adalah :

1. Pihak terhukum tidak dengan suka rela menjalankan putusan walaupun telah diberi peringatan (*Aan Maning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
2. Untuk pembagian harta warisan berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing. Tanah yang berbidang bidang yang

³¹ Drs. Wildan Suyuthi Mustofa, SH., MH. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*. PT. Tatannusa. Jakarta 2002.

letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit contohnya jika salah satu pihak mendapatkan tanah yang satu bidang tetapi oleh karena perhitungannya tidak mencukupi sebidang tanah tersebut maka kekurangannya tersebut dapat diambil dalam bidang yang lain tapi nilai tanah yang lain tersebut lebih mahal atau lebih murah dari bidang tanah tersebut diatas maka untuk menentukannya dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dari Hakim atau Panitera atau juru sita.

Untuk mengatasi hal demikian maka Pengadilan mau tidak mau segera melaksanakan lelang terhadap harta peninggalan tersebut apabila pihak yang berperkara tidak dengan sukarela terhadap bagian satu dengan yang lain.

Untuk benda-benda bergerak seperti kendaraan dan perabotan rumah tangga, perhiasan dapat dengan mudah menaksir harganya namun terhadap harta-harta kuno seperti keris, guci-guci kuno dan barang-barang kuno lainnya oleh juru sita tidak dapat menaksir harga barang tersebut. Untuk mengatasinya maka jurusita harus meminta bantuan orang yang ahli dalam bidang tersebut.

Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili maka Pengadilan Agama harus menunggu putusan dari Mahkamah

Agung. Adanya sengketa kewenangan jelas menghambat proses putusan dan apabila putusan Mahkamah Agung tidak memberikan kewenangan akibatnya tidak akan pernah ada putusan Pengadilan Agama terhadap perkara yang di ajukanya tersebut

Apabila terjadi sengketa milik, maka Pengadilan Agam tidak berwenang mengadilinya namun Pengadilan Agama tetap melanjutkan sidang tetapi putusannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, jelas ini sebagai hambatan dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan pembagian warisan.³²

Mengenai hambatan dari perangkat hukum tertulisnya memang ada tetapi hal itu tidak menjadikan masalah, karena sistem Peradilan di Indonesi menganut sistem bahwa hakim bukanlah pelaksana Undang-Undang secara murni tetapi Hakim adalah pelaksana hukum, menciptakan hukum.³³

³² Wawancara, *Ibid*

³³ Wawancara. *Ibid..*

C. Masalah yang Timbul dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Berkaitan Perkara Warisan.

1. Ketidakadasepakatan Hak Opsi Dapat Menimbulkan Sengketa Kewenangan Mengadili

Mungkin pada saat penggodogan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 para perancang Undang-undang tersebut tidak pernah terpikir bahwa setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kelak akan terjadi sengketa kewenangan dengan lingkungan Peradilan lain, hal ini dipicu karena adanya salah satu dalam Penjelasan Umum pada poit 2 alinea keenam yang menyatakan adanya pilihan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, terlebih lagi dalam praturan tersebut tidak memberikan solusi yaitu tata cara bagaimana melaksanakan pertimbangan hukumnya serta bagaimana kalau para pihak tidak mempunyai kesepakatan sama sekali dalam pemilihan hukum tersebut, semuanya tidak disinggung sama sekali. Maka untuk mengantisipasi hal demikian Hakim atau Penasihat hukum dituntut untuk lebih jeli lagi menggali praturan-praturan yang telah ada selain bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut

Hak opsi adalah hak pilihan dalam menentukan peradilan mana yang akan para pihak pilih sebelum mengajukan gugatan waris. Karena masyarakat muslim di Indonesia diikat oleh dua sistem hukum waris yaitu hukum waris Islam yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama dan hukum waris Adat yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. Karena sifat dualisme hukum tersebutlah sering terjadinya beda keinginan dari para pihak yang bersengketa. Maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kesepakatan para pihak untuk memilih hukum mana yang akan mereka pakai dalam pemeriksaan perkara. Kadang kesepakatan itu mahal harganya bagi pihak yang berseteru lalu kenyataannya sangat sulit untuk mencari titik temu dari kesepakatan tersebut, hal ini disebabkan antara lain untuk kepentingan masing-masing pihak yakni disatu pihak apa bila dia menggunakan hukum Adat maka pihak lainnya tidak mendapat sedikitpun, atau setidaknya berkurang bagian harta peninggalan dan sebaliknya ³⁴

Kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa pembagian warisan bagi orang-orang muslim sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) UU.No 7/1989, menurut Penjelasan Umum Butir 2 alinea keenam dari Undang-Undang tersebut dapat dikesampingkan oleh kesepakatan pihak-pihak untuk memilih cara

³⁴ Putusan pengadilan Agama Sleman no 303/Pdt?2003/PA.Slm (Penggugat adalah adik kandung pewaris melawan tergugat yaitu isteri pewaris beserta anak angkat pewaris)

menyelesaikan sengketa tersebut melalui lingkungan Peradilan Umum. Kesepakatan menjadi mutlak bagi pengajuan sengketa tersebut ke lingkungan Peradilan Umum. Kesepakatan juga harus mutlak diperoleh sebelum gugatan tersebut di ajukan ke Pengadilan, selama kesepakatan para pihak tidak ada, Peradilan Umum harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa secara *ex officio*.

Lain halnya pada lingkungan Peradilan Agama untuk perkara warisan, setiap perkara yang diajukan, hakim beranggapan bahwa setelah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama artinya para pihak dianggap telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa warisan di Pengadilan Agama dan hakim tidak perlu mempertanyakan agama para pihak, walaupun nantinya ada tangkisan dari salah satu pihak yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena pihak tersebut telah mengajukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Untuk hal demikian biasanya hakim Pengadilan Agama menolak Eksepsi tersebut dengan pertimbangannya adalah berdasarkan azas Personalitas Keislaman yang ditafsirkan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah beragama Islam, maka selama tidak ada kesepakatan pilihan hukum sebelum gugatan diajukan, selama itu pula melekat Kompetensi Absoloute Pengadilan Agama terhadap perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam.

Namun apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk mempertimbangkan lingkungan peradilan yang mana akan mereka pilih walaupun sudah upayakan musyawarah dengan memintakan Lurah, Camat dan Bupati sekalipun, tetapi tidak diketemukan titik temu antara para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu disatu pihak mengajukan gugatan di Peradilan Agama sedangkan di pihak lain tetap pada pendirian mengajukan gugatan ke Peradilan Umum. Jadi terhadap kasus yang sama, objek yang sama, subjek yang sama, timbul dua perkara di depan forum lingkungan Peradilan yang berbeda, jelas nantinya akan terjadi dua putusan yang berbeda pula dan pada akhirnya akan terjadi dua eksekusi yang berasal dari dua putusan yang berbeda terhadap objek harta warisan yang sama. Maka bila terjadi eksekusi dilapangan akan berhadapan dua eksekutor dari dua pengadilan yang berbeda terhadap objek yang sama.

Untuk tidak terjadinya perbuatan-perbuatan hukum diatas maka telah disebutkan diatas di butuhkan kejelian hakim dan pihak yang berperkara dalam hal ini penasihat hukum, hakim di harapkan jangan gegabah dalam menangani kasus yang punya potensi terjadinya sengketa kewenangan mengadili.

2. Sengketa Milik

Sengketa milik dapat terjadi di Pengadilan Agama hal ini disebabkan tidak lain yaitu :

1. Perkara warisan yang digugatkan salah satu pihak kepada pihak lain dimana pihak penggugat meminta kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara waris. Pihak penggugat menggugat harta yang diyakininya adalah harta warisan tetapi di pihak tergugat dalam eksepsinya menolak gugatan penggugat bahwa harta tersebut seluruh atau sebagian bukan harta warisan.
2. Adanya intervensi (*tussen komst*) dari pihak ketiga yang mengaku bahwa objek harta warisan yang menjadi sengketa telah dijual ahli waris kepada pihak ketiga tersebut.

Untuk menyelesaikan kedua perkara sengketa milik tersebut oleh pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa bila suatu perkara yang sedang diproses di Pengadilan Agama barang objek yang diperkarakan mengandung sengketa milik atau keperdataan lain, khusus mengenai barang objek yang menjadi sengketa milik tersebut harus diputus terlebih dahulu dalam lingkungan peradilan umum dahulu.

Pada point (i) dalam perkara tersebut punya potensi untuk terjadinya sengketa kewenangan apabila pihak yang merasa dirugikan akan gugatan ke Pengadilan Agama tersebut juga mengajukan gugatan ke Peradilan Umum sebagai perkara sengketa milik, sedangkan di Pengadilan Agama tetap mempertahankan untuk terus melaksanakan pemeriksaan berdasarkan gugatan penggugat.

Untuk menghilangkan konflik dalam hal ini hakim Pengadilan Agama harus melihat dahulu apakah benar perkara tersebut sedang di periksa di lingkungan peradilan umum. Kalau memang benar hakim dapat meneruskan perkara tersebut tetapi sifat putusannya tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum) tetapi harus bersifat deklatoir. Bersifat deklatoir artinya putusan tersebut tidak mengandung atau melekat sifat eksekutorial, hanya berisikan penetapan siapa-siapa ahli warisnya serta besar bagian masing-masing ahli waris, tidak memutuskan harta warisan karena harta warisan tersebut masih tersandung sengketa milik yang menjadi wewenang dari Peradilan Umum.

Pada point (ii) adanya intervensi (tussents koms) dari pihak lain diluar pihak yang berperkara untuk masuk kedalam perkara tersebut, biasa pihak tersebut megklaim bahwa harta warisan yang menjadi objek sengketa merupakan hak miliknya perihal demikian adalah sengketa

hak milik yang berwenang adalah Peradilan Umum tetapi telah di periksa oleh Peradilan Agama. Masuknya intervensi ini juga punya potensi menimbulkan sengketa kewenangan, apabila pihak ketiga tersebut mengajukan gugatnnya ke Peradilan Umum terhadap pihak-pihak yang bersengketa di Peradilan Agama.

Sikap hakim Peradilan Agama seharusnya sidang tetap dilanjutkan, dengan kata lain hakim untuk sementara menghentikan pemeriksaan antara tergugat dengan penggugat tapi pemeriksaan diarahkan pada pembuktian dalil-dalil intervensi tersebut.

Jika dilain tempat oleh pihak ketiga (yang mengintervensi di Pengadilan Agama) mengajukan gugatan sengketa milik ke Peradilan Umum, maka sikap hakim Pengadilan Agama harus menunda perkara tersebut untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung tentang kewenangan, yang tekhnis dan pelaksanaanya berpedoman pada pasal 56 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 dan SEMA No. 1 tahun 1999.

Jika terjadi sengketa kewenangan antara dua pengadilan atau lebih yang mengadili perkara yang sama dapat diajukan permohonan secara tertulis ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili oleh :

1. Hakim karena jabatannya.

2. Pihak yang berperkara.

Selanjutnya jika diajukan ke Mahkamah Agung maka semua pengadilan yang bersebgketa kewenangan tersebut harus menunda pemeriksaan perkaranyatersebut yang menuangngkan dalam bentuk Penetapan sampai perkara sampai sengketa kewenangan mengadili diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan masing-masing pengadilan yang bersengketa kewenangan mengadili tersebut harus saling mengirimi salinan penetapanya.

Pihak yang berperkara di pengadilan yang menyatakan pengadilan lain tersebut tidak berwenang dapat memintakan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya melalui Ketua Mahkamah Agung.

TIPT-PUSTAK-UNDIP

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan tentang Pelaksanaan Kewarisan menurut hukum Islam di Pengadilan Agama maka dapat disimpulkan

1. Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Islam di Pengadilan Agama dapat dilaksanakan karena perkara permohonan dan perkara gugatan.

Perkara permohonan yaitu perkara yang tidak mengandung unsur sengketa dimana terdapat hanya satu pihak saja. Pelaksanaan Acaranya jelas sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang panjang, dikarenakan antara ahli waris telah terjadi kesepakatan terhadap bagian masing-masing yang bersifat kerelaan, maka dengan ini Pengadilan Agama dapat memberikan Penetapan atau Akta Pembagian Waris yang dibuat ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama.

Sedangkan yang perkara yang mengandung unsur sengketa adalah gugatan dari penggugat terhadap orang yang menguasai secara keseluruhan atau separuhnya harta peninggalan yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris lainnya. Perkara

gugatan akan diputuskan hakim apa bila dalil-dalil baik yang diajukan penggugat maupun tergugat telah diperiksa dan dibuktikan dimuka pengadilan yang berupa mengabulkan baik secara keseluruhan atau sebagian, atau pun dapat menolak secara keseluruhan gugatan.

Perdamaian dapat terjadi apa bila para pihak di tengah-tengah pemeriksaan dapat di damaikan oleh hakim atau inisiatif para pihak. Oleh hakim setelah ada perdamaian dibuat akta perdamaian yang biasanya terdiri dari kesepakatan para pihak yang bersengketa atas besar bagian harta peninggalan masing-masing. Terhadap akta perdamaian tersebut harus mematuhi isi dari kesepakatan di dalam akta tersebut.

Negosiasi terjadi apabila pihak yang terhakum tidak segera dan sukarela melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bersifat eksekutorial, maka oleh Pengadilan, pihak terhakum dan pihak lawannya dipanggil kembali untuk mengadakan negosiasi, untuk negosiasi ini terhadap putusan hakim dikesampingkan dahulu apabila terjadi kesepakatan terhadap bagian harta harta peninggalan dan oleh Pengadilan Agama di buat Berita Acara negosiasi sampai pelaksanaan pembagiannya.

2. Putusan hakim adalah penentuan, harta warisan, siapa-siapa ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris serta memerintahkan dengan segera pihak terhakum untuk melaksanakan pembagian warisan. Pelaksanaan tersebut akan menghadapi hambatan apabila pihak terhakum tidak dengan suka rela membagi harta warisan yang ada dalam kuasanya, bentuk harta warisan yang berupa tanah yang berbidang-bidang yang nilainya berbeda-beda terlebih para pihak tidak ada yang mengalahi, terhadap harta yang bernilai seni dan antic yang oleh perangkat Pengadilan Agama tidak menguasai hal demikian. Hambatan lain bila terjadi sengketa kewenangan yang telah diproses di Mahkamah Agung maka pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan tersebut turun. Sedangkan hambatan-hambatan dalam eksekusi terdapat dua macam yaitu pertama bersifat teknis yuridis dan hambatan non teknis yuridis.
3. Masalah yang timbul dalam penerapan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 antara lain adanya sengketa kewenangan mengadili. Sengketa kewenangan mengadili tersebut dapat di timbulkan karena adanya pilihan hukum dan sengketa hak milik. Karena pilihan hukum adalah bila kedua belah pihak masing-masing secara bersamaan mengajukan gugatan pada masing-masing

lingkungan Peradilan yang berbeda. Sengketa hak milik dapat ditimbulkan dari tangkisan pihak tergugat di Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa objek warisan seluruh atau sebagian bukan harta peninggalan dan menyatakan juga Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara hak milik karena kewenangan mengadili ada pada Peradilan Umum dan perkara hak milik tersebut telah diajukan gugatan untuk di periksa dan diputuskan ke Pengadilan Negeri.

Sama dengan halnya diatas intervensi juga punya potensi yang besar dalam timbulnya sengketa kewenangan.

B.Saran-saran

Setelah memperhatikan uraian dan kesimpulan dalam tesis ini maka penyusun mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan secara politis terhadap penyempurnaan hukum yang berkaitan dengan keberadaan Peradilan Agama, walaupun selama ini telah terjadi banyak perubahan dibandingkan dengan sebelum di Undangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Namun seiring meningkatnya kesadaran Umat Islam dalam melaksanakan pembagian waris semakin banyak pula kendala-kendala yang akan dihadapi seperti yang

sudah ada sering terjadinya titik singgung kompetensi absolute dalam hal kewenangan mengadili perkara warisn tersebut antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

2. Perlunya diupayakan peningkatan sistem hukum kewarisan Islam secara nasional serta kompletisitas hukum tersebut, karena saat ini statusnya dari hukum kewarisan Islam hanya sebatas putusan menteri. Hukum kewarisan Islam sangat membutuhkan dasar hukum yang kuat karena ada dua sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia di luar hukum Islam, antara lain hukum Eropa dan hukum Adat yang telah mempunyai akar hukum yang kuat, alangkah baiknya akar hukum waris Islam dikuatkan menjadi sebuah Undang-Undang.
3. Perlu diadakan sosialisasi hukum kewarisan Islam lebih mendalam bagi masyarakat Islam di Indonesia karena banyak sekali orang Islam yang tidak mengerti pembagian warisan menurut hukum Islam yang kegunaannya antara lain mereka dapat membagi sendiri perkara warisan tanpa perlu ke lembaga peradilan yang pada akhirnya mempersempit timbulnya sengketa kewenangan mengadili.
4. Untuk para notaris dengan memahami kewarisan Islam perlu di tingkatkan, karena notaris di mata masyarakat adalah orang yang

dianggap memahami seluk beluk hukum baik itu hukum Islam maupun hukum-hukum yang lainnya. Pentingnya pemahaman hukum Islam di bidang kewarisan oleh notaris, dimana suatu saat notaris akan di hadapkan pada permasalahan kewarisan Islam ditengah-tengah kesibukan tugasnya dan sebagai anggota masyarakat yang dianggap mengerti masalah hukum.

5. Untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar lebih teliti terhadap tanah yang peralihannya melalui warisan. Perlunya agar tidak dilupakannya salinan Putusan, Penetapan, Akta Perdamaian, Berita Acara Negosiasi sebagai salah satu syarat mutlak untuk terjadinya peralihan hak atas tanah dan bersertifikat dengan tidak mengabaikan persyaratan persyaratannya.

RINGKASAN

Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Penetapan atau Putusan hakim Pengadilan Agama dapat dilaksanakan setelah kedua produk hakim Pengadilan Agama menjadi kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan hukum yang tetap adalah jika Penetapan atau Putusan tersebut tidak dilakukakn upaya-upaya hukum setelah masa tenggang waktu diberikan telah habis. Maka oleh pihak terhukum untuk segera melaksanakan putusan hakim tersebut. Jika putusan hakim tersebut tidak segera dilaksanakan (untuk pembagian) maka sebelumnya hakim memberi peringatan kepada pihak terhukum untuk segera melaksanakan putusan tersebut, setelah di beri peringatan tetapi putusan belum juga dilaksanakan maka pihak lain dapat memintakan eksekusi kepada hakim. Tetapi dalam praktek biasanya hakim terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk melakukan Negosiasi.

Dalam negosiasi tersebut hakim sebagai penengah dan pengarah untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan terhadap pembagian-pembagian. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka oleh hakim di buat Berita Acara Negosiasi yang isinya memuat antara lain telah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak setelah ada putusan hakim, serta memuat bagian-bagian masing-masing yang berdasarkan kesepakatan dalam negosiasi tersebut.

Jika Negosiasi tidak ada kesepakatan maka hakim memerintahkan juru sita untuk melakukan eksekusi pelaksanaan pembagian waris. Pada saat eksekusi

tersebut ada hambatan-hambatannya serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian, mengenai hambatan-hambatan tersebut telah di uraikan secara jelas pada Bab IV point B hal 90. tesis ini.

Mengenai sengketa kewenangan mengadili yang timbul oleh adanya hak opsi yaitu karena kedua secara bersamaan mengajukan gugatan ke dua lingkungan peradilan yang berbeda terhadap satu objek sengketa dengan pihak-pihak yang sama. Sengketa hak milik dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili apa bila dalam objek sengketa tersebut terdapat sebagian atau seluruhnya yang diklaim salah satu pihak. Bukan objek warisan sama sekali atau didalam objek sengketa tersebut ada sebagian hak milik tetapi Pengadilan Agama tetap memeriksa perkara tersebut, sedangkan dipihak lain telah mengajukan gugatan hak milik ke Pengadilan Negeri dan tetap di periksa perkara tersebut karena Pengadilan Agama merasa berwenang terhadap perkara tersebut.

Adanya Intervensi dari pihak ketiga dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili dengan dasar yang sama dengan ketentuan gugatan hak milik diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, SH. MH *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*. Ekonosia FE-Ull Yogyakarta 2002.Cet 1

Achid Masduki, SH. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Perpustakaan Fakultas Hukum Ull Yogyakarta 1988

Ahmad Azhar Basyir.,H.,MA. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ull Pres 2000. Edisi revisi

Ahmad Azhar Basyir.,H.,MA. *Hukum Waris Islam*. Ull Pres Yogyakarta 1985

Ahmad Azhar Basyir.,H.,MA., Zaini Dahlan.,Prof.,H.,MA., Moh.Fajrul Falaakh.,H.,SH.MA., Zaenal Abidin AB, SH., Zarkowi Soejoeti.M.,H.,Drs. Yahya Harahap, SH. Moh. Mahfud MD.,DR.,SH. SU., Syechul Hadi Permana,KH.,DR.,SH.,MH. Abdul Gani Abdullah.,DR., MA. Abdullah Kelib.,H.,Prof.,SH., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*. Ull Pres Yogyakarta 1993.Cet 1.

Ahrum Hoerudin.,Drs *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU no 7 tahun 1989)*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1999 Cet 1.

Ali Afandi.,Prof.,SH. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta Jakarta 1997. Cet 4

Daud Ali.,H.,M.,Prof.,SH. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan dan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1997 Cet 1.

Fatur Rachman. *Ilmu Waris*. PT.Alma'arif, Bandung 1987.

Friedmann.,W. *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum)*. PT. Raja Grafindo Jakarta 1996.Cet 3

Hasniah Hasan.,Dra. *Hukum Warisan dalam Islam*. PT. Bina Ilmu Surabaya 1987. Cet 1.

- Hamkah.,Prof., DR.** *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panji Jakarta 1983
- Hazairin.,Prof.,DR.** *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Tinta Mas Jakarta 1967. Cet 4
- Iman Sudiyat**, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, 1981
- Imron., AM** *Pradilan Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya 1993
- Ter Haar Bzn.,B** *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita Jakarta 1999. Cet 12
- Kansil.,C.S.T.,Drs.,SH.** *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta 1989. Cet 8.
- Lexy Maleong**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, 1999., Cet ke 2.
- Moh.Anwar, Bc Hk.,Drs.** *Farai'idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al-Ikhlas Surabaya 1981.
- Moh. Idris Ramulyo, SH, MH.** *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika Jakarta 2000. Cet 2
- Muh.Ali As-Shabuni**, *Hukum Waris Islam dalam Syariat*. CV. Diponegoro 1998
- Mukti Artho.,H.A.,Drs.,SH.** *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 1996. Cet 1.
- Nasution.,S.** *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Purwadarminta WJS.** *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta 1984.
- Sanafiah Faisal**, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang 1990.
- Sayid Sabiq**, *Fiqih Sunnah*. PT. Alma'arif, Bandung 1988

- Subekti.,Prof.,SH.** *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* PT. Intermasa Jakarta 1995. Cet 27
- Subekti.,Prof.,SH.** *Hukum Acara Perdata.*Bina Cipta. Bandung 1982. Cet. 1
- Sudikno Mertokusumo.,Prof.,DR.,SH.** *Mengenal Hukum (suatu pengantar).* Liberty Yogyakarta1999. Edisi ke IV Cet.2
- Soerjono Soekanto,** *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum,* Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Suhrawardi. K. Lubis dan Kosmis Simanjuntak,** *Hukum Waris Islam,* Sinar Grafika, Jakarta 1995
- Sulaiman Rasjid.,H.** *Fiqih Islam.* Sinar Baru Bandung 1992. Cet 25.
- Sutopo.,HB** *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II,* UNS Press, Surakarta, 1998
- Tair., M.A. & Mr.H Van Der Tas.** *Kamus Bahasa Belanda.* Timun Mas Jakarta 1957.
- Toha Jabir al-Alwani,** *Metodologi Hukum Islam Kontemporer,* UII Press. Yogyakarta 2002.
- Wildan Suyuthi Mustofa,H.,Drs.,SH.,MH.** *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Pengadilan Agama.* PT. Tatanusa. Jakarta.2002. Cet.1.
- Wirjono Prodjodikiro,** *Bunga Rampai Karangan Terbesar,* Ichtiar Baru. Jakarta 1974 Cet I
- Yahya Harahap.,M., SH.** *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pertadilan Agama UU No. 7 TAHUN 1989.* Sinar Grafika Jakarta.Edisi Kedua. Cet .2

Lain-lain

- **Al-Qur'an dan Terjemahannya.** PT. Kathoda Jakarta 1990
- **Ensiklopedi Hukum Islam,** PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarat 1993. Cet 1
- **Mimbar Hukum Nomor 21 /VI/ 1995**
- **Mimbar Hukum Nomor 24 /VII/ 1996**
- **Mimbar Hukum Nomor 27 /VII/ 1996**
- **Mimbar Hukum Nomor 125 /XII/ 1996**
- **Mimbar Hukum Nomor 44 /X/ 1999**
- **Suara Merdeka 26 September 2003**

Praturan-praturan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tap MPR RI nomor IX/MPR/1999.
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991.
8. Praturan-praturan lainnya yang ada kaitannya.